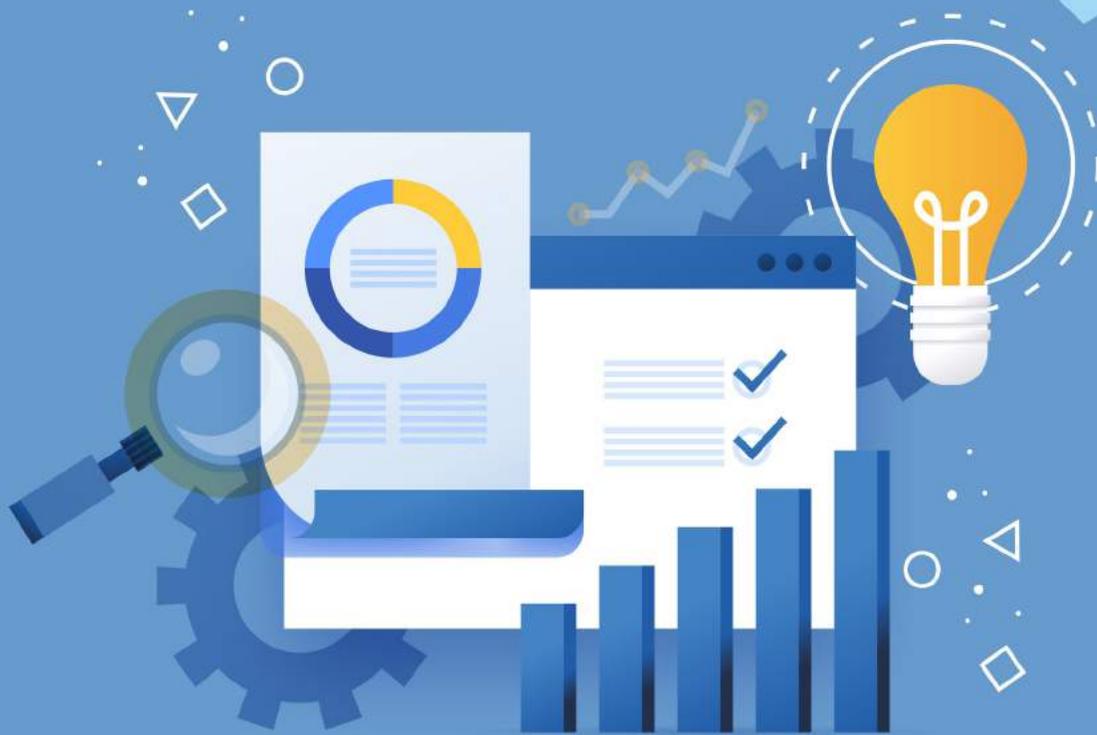




PEMERINTAH KABUPATEN
POLEWALI MANDAR



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2021

**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan pertanggungjawaban dan komitmen organisasi mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Melalui Laporan ini publik, instansi dan di internal organisasi dapat melakukan evaluasi dan penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal.

Terdapat 6 (enam) sasaran strategis Dinas KominfoSP Tahun 2021, dengan capaian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik Indikator : Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (81,00)	Menuju Informatif (87,65)	101,2
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah Indikator : Persentase Fungsi-fungsi Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	50	54,17	108,33
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah Indikator : Persentase Data Sektorial Yang Valid	68	74,56	109,64
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Sangat Baik (82)	Sangat Baik (97,04)	118,3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Indikator : Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A (80)	A (82,76)	103,45
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah Indikator : Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	100
Kinerja Rata-rata			107,98%

Untuk pencapaian sasaran tersebut telah dialokasikan anggaran tahun 2021 sebesar Rp 6.116.339.202,- dan terealisasi Rp 5.226.670.463,- atau persentase realisasi 85,73%. Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dinyatakan "berhasil". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar 107,98% serta capaian kinerja keuangan sebesar 85,47%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 14,55%.

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian ini disusun sebagai perwujudan pertanggung jawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Tahun 2021. Laporan ini pula sebagai bentuk komitmen Dinas KominfoSP mengimplementasikan paradigma Pemerintahan Berorientasi Hasil. Dalam penyusunannya, diungkapkan aspek perencanaan kinerja berupa sasaran strategis, indikator outcome dan target kinerja yang diperjanjikan. Dalam pengukurannya, diungkapkan perbandingan realisasi dengan target, perbandingan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan target jangka menengah yang tertian dalam Renstra 2019-2024, analisis efisiensi, keberhasilan atau kegagalan dilengkapi faktor penunjang, kendala serta solusi yang diupayakan serta aspek akuntabilitas keuangan.

Dengan demikian, Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan penilaian keberhasilan dan kegagalan Dinas KominfoSP dalam pencapaian sasaran-sasaran strategis organisasi, sehingga pada masa mendatang dapat dilakukan upaya-upaya perbaikan kebijakan, strategi dan aksi untuk hasil yang lebih optimal. Semoga dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini, seluruh jajaran aparatur Dinas KominfoSP semakin memantapkan komitmen dan perannya untuk berkolaborasi meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Umum	1
B. Tugas dan Fungsi Organisasi	2
C. Isu Strategis Organisasi	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	5
A. Rencana Strategis	5
B. Perjanjian Kinerja 2021	6
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	9
A. Capaian Kinerja Tahun 2021	9
B. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN	

Daftar Gambar, Chart dan Tabel

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	3
Gambar 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kominfo SP, Tahun 2019-2024	5
Tabel. 2.1	Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024	6
Tabel 2.2	Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2020	9
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021	10
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2021	22
Tabel 3.3	Pemetaan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan Yang telah didukung Teknologi Sistem Informasi	23
Tabel 3.4	Penataan Bandwitch Pemerintah Daerah Tahun 2019-2021	28
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021	32
Tabel 3.6	Pemenuhan Data Sektoral Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021	33
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2021	36
Tabel 3.8	Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas KominfoSP Tahun 2021	36
Tabel 3.9	Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021	38
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja sasaran Strategis VI Tahun 2021	40
Tabel 3.11	Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2021	42

Chart 3.1	Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)	19
Chart 3.2	Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021, Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)	27
Chart 3.3	Peningkatan Kapasitas Bandwitch Tahun 2020-2021	30
Chart 3.4	Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2019 s.d. 2021	30
Chart 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Data Statistik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)	32
Chart 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas KominfoSP Tahun 2021 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (Akhir)	47
Chart 3.7	Perkembangan Implementasi SAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2019-2021	39
Chart 3.8	Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas KominfoSP Tahun 2021	42



BAB 1 PENDAHULUAN

UMUM

1. Latar Belakang

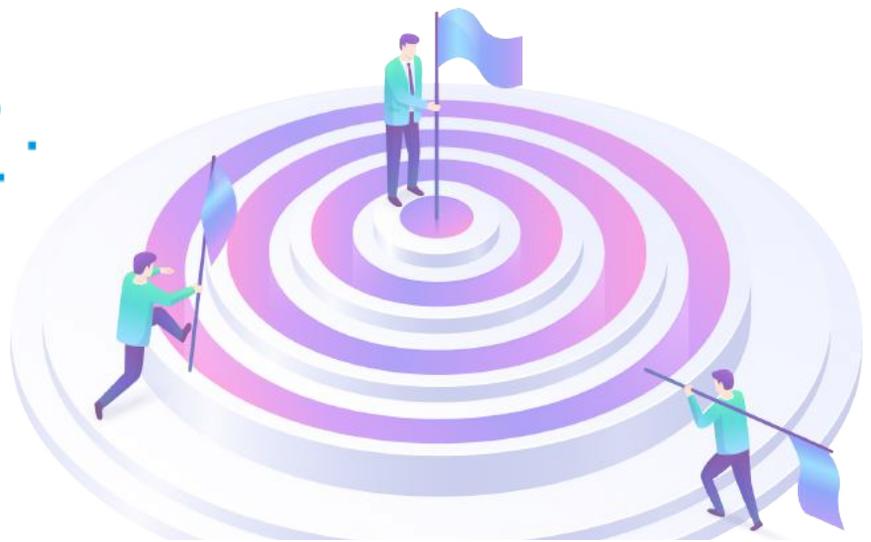
Salah satu tuntutan publik pada saat ini adalah terselenggaranya pemerintahan yang baik (Good Governance), sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung-jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Berkaitan dengan hal ini, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengacu pada peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil. Melalui SAKIP ini, disusun perencanaan kinerja yang focus pada permasalahan utama pemerintahan atau organisasi serta berorientasi pada perbaikan pencapaian sasaran kinerja yang terukur. Rencana Kinerja yang telah ditetapkan tersebut selanjutnya diukur pencapaiannya secara berkala serta mengidentifikasi permasalahan dan solusi jangka pendek dan jangka panjang yang dapat diupayakan untuk memastikan tercapainya sasaran. Pada setiap tahun kinerja berakhir, maka entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan diikuti dengan review dan evaluasi terhadap implementasi SAKIP dan pencapaian kinerja sebagai bahan perbaikan implementasi SAKIP pada tahun-tahun selanjutnya.

Sehubungan dengan telah berakhirnya tahun anggaran 2021 dan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Dinas KominfoSP) sebagai entitas SAKIP wajib menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dalam Penyusunan Laporan ini, diungkapkan capaian kinerja organisasi yang membandingkan antara target dengan realisasi, realisasi kinerja tahun berkenaan dengan tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan serta efisiensi sumber daya yang berhasil dilakukan dan akuntabilitas keuangan.

2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2021 dimaksudkan untuk menyediakan dan memberikan informasi terkait pencapaian kinerja secara terukur dengan memberikan perbandingan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya, perbandingan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya, keberhasilan dan kegagalan, serta efisiensi sumber daya dan akuntabilitas keuangan.

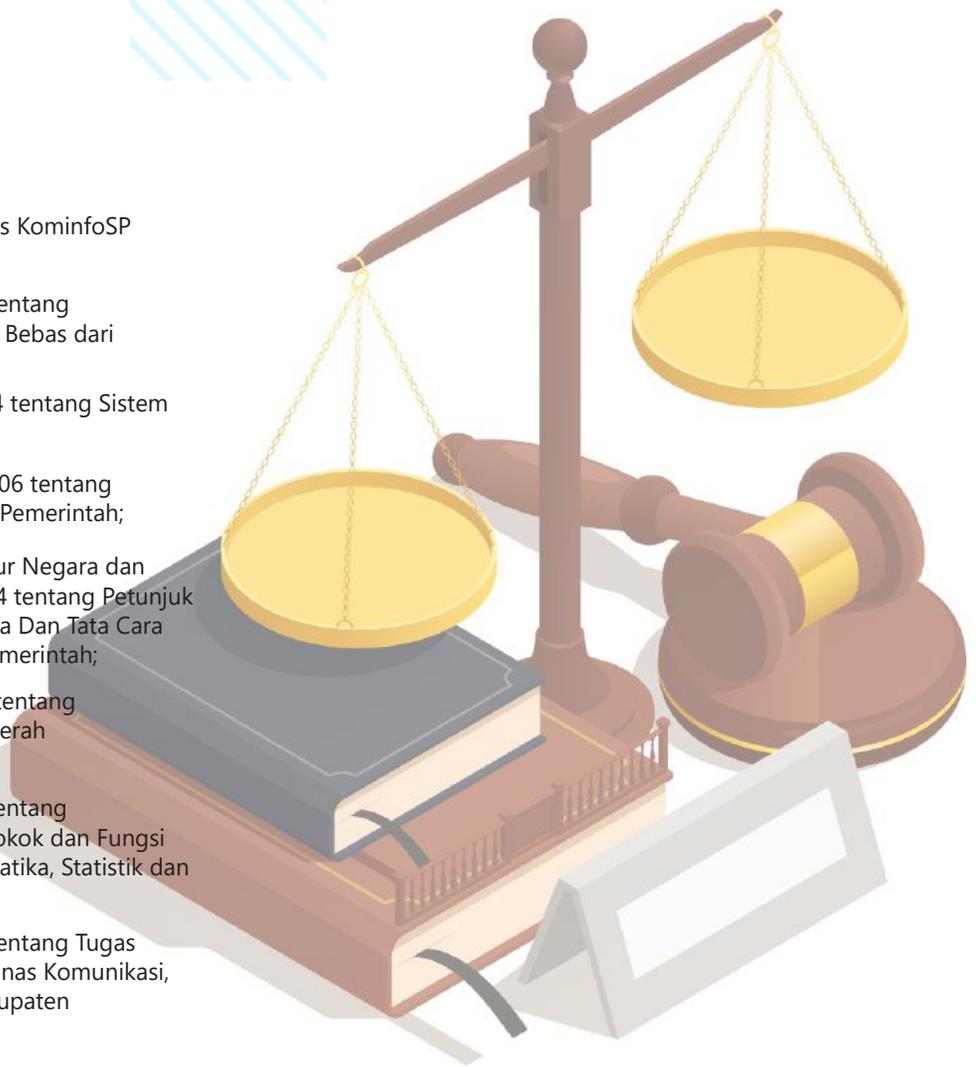
Tujuan yang diharapkan melalui penyusunan LAKIP ini adalah tersedianya bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja organisasi selanjutnya dengan mencermati berbagai kendala dan permasalahan yang masih dihadapi dalam pencapaian kinerja organisasi yang telah ditetapkan.



3. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan LAKIP Dinas KominfoSP Tahun 2021 ini, sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- f. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar
- g. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar

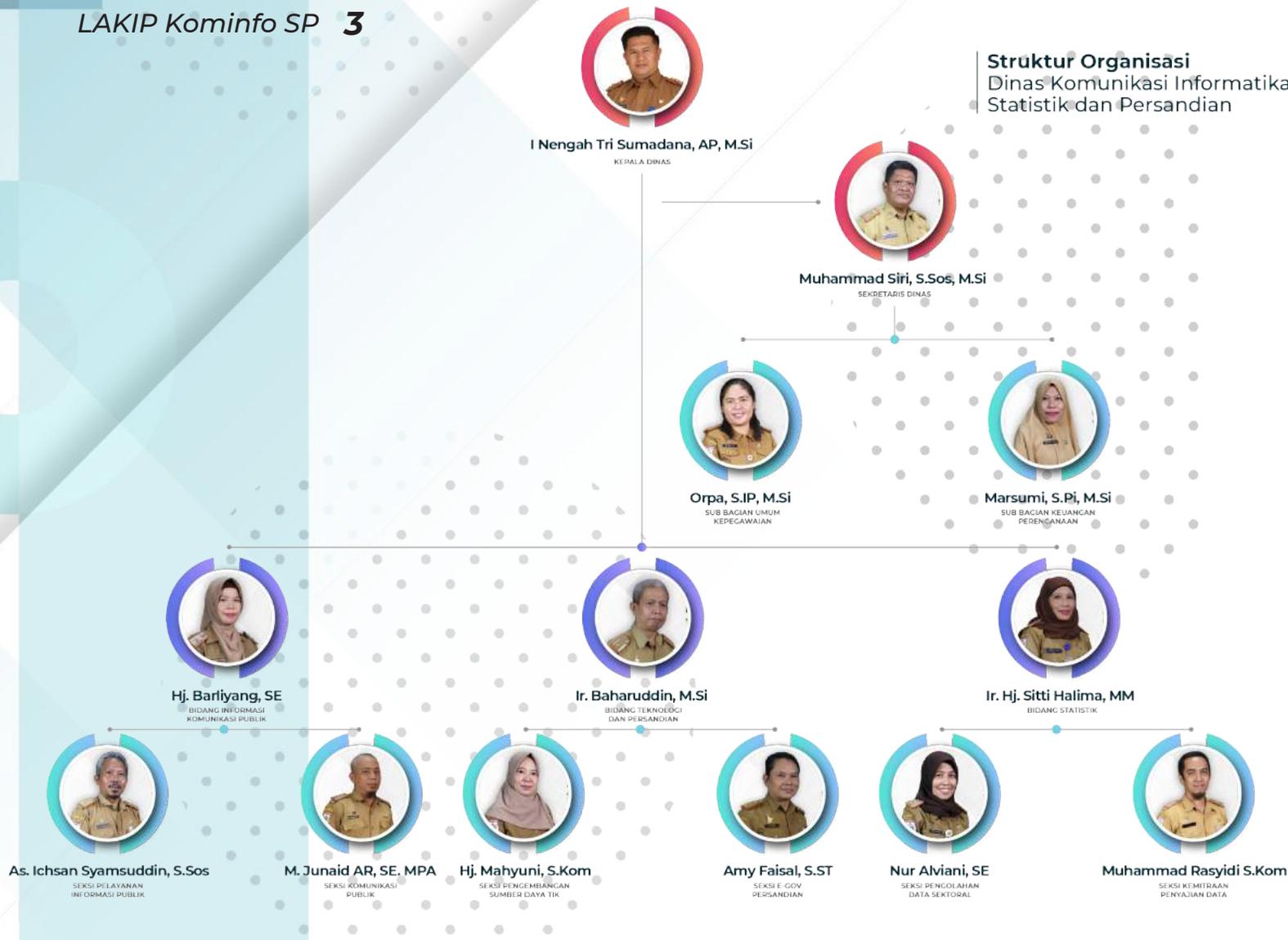


TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI

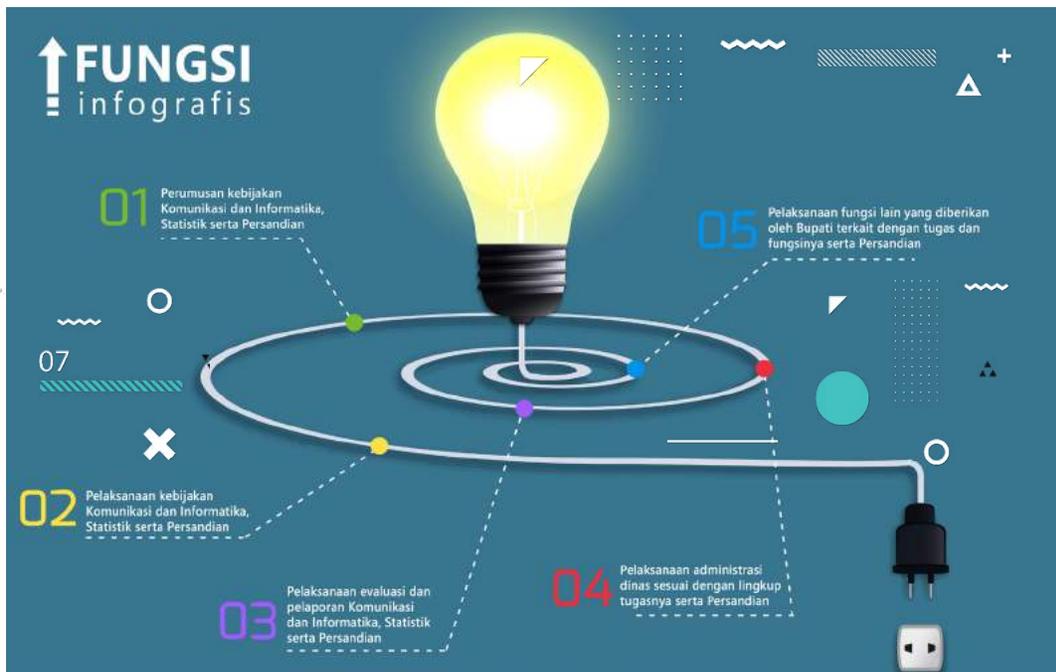
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12) dan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar merupakan **unsur pelaksana** urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi Informatika
Statistik dan Persandian



Dalam Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar adalah melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi tanggung jawabnya dan tugas perbantuan yang diberikan Pemerintah Pusat, serta membantu Bupati dalam urusan komunikasi statistik dan persandian yang menjadi kewenangan daerah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar mempunyai fungsi sebagai berikut :



ISU STRATEGIS ORGANISASI

Identifikasi isu-isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas KominfoSP dapat diuraikan sebagai berikut :

Rendahnya kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Hingga saat ini, kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Polewali Mandar masih berada dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Belum optimalnya implementasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Hal ini disebabkan oleh belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan LAPOR.
- b. Belum optimalnya publikasi kegiatan perangkat daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Hal ini terlihat dari kurangnya publikasi kegiatan perangkat daerah pada masing-masing web. Hal ini dipengaruhi oleh belum terbangunnya standar dan sistem prosedur layanan peliputan dan publikasi kegiatan perangkat daerah dan belum optimalnya koordinasi dan kerjasama publikasi dengan perangkat daerah. Disisi lain media publikasi yang dapat dijangkau oleh Dinas hanya memanfaatkan Media Sosial dan Media Majalah Warta KominfoSP yang cakupan akses masyarakat terhadap informasi public tersebut terbatas pada masyarakat pengguna media sosial.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan e-PPID dan website Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah terkait pengelolaan informasi dan komunikasi publik.

Rendahnya kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian Daerah

Hingga saat ini, cakupan fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis teknologi Informasi Komunikasi dan Persandian hanya sebesar 54%. Sejumlah faktor yang menyebabkan kondisi tersebut, antara lain :

- a. Belum optimalnya Data Center sebagai fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan data dan pemulihan data.
- b. Belum memadainya kapasitas bandwidth perangkat daerah sehingga kecepatan akses dan pengiriman data tidak maksimal
- c. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang ada dan digunakan Perangkat Daerah saat ini belum terpadu dan belum memenuhi standar dan masih berada di level 2 (dua) baik dari aspek kematangan kapabilitas proses yang berada pada level terkelola maupun kematangan pada kapabilitas fungsi yang berada pada level interaksi.
- d. Pemerintah Daerah belum menerapkan keamanan informasi yang memadai sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Rendahnya kualitas Data Sektoral

Hingga saat ini data-data sektoral yang dianggap valid dan memadai adalah data-data yang tersedia pada Polewali Mandar Dalam Angka yang dikeluarkan oleh BPS, namun data ini hanya menyajikan keadaan 1 (satu) tahun sebelumnya, sehingga dari aspek kekinian masih dianggap belum update. Perangkat Daerah belum mengelola data sektoral dengan baik, hal ini dapat dilihat dari data yang dibutuhkan belum dapat disediakan dalam waktu singkat, data belum dapat diakses secara luas dan mudah, data belum terstandarisasi, metadada belum tersedia, dan interoperabilitas data belum terbangun. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah faktor, sebagai berikut :

- a. Belum terbangunnya tata kelola data sektoral;
- b. Belum adanya forum koordinasi data;
- c. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam melakukan penyediaan data; dan
- d. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi dalam penginputan data Perangkat Daerah;

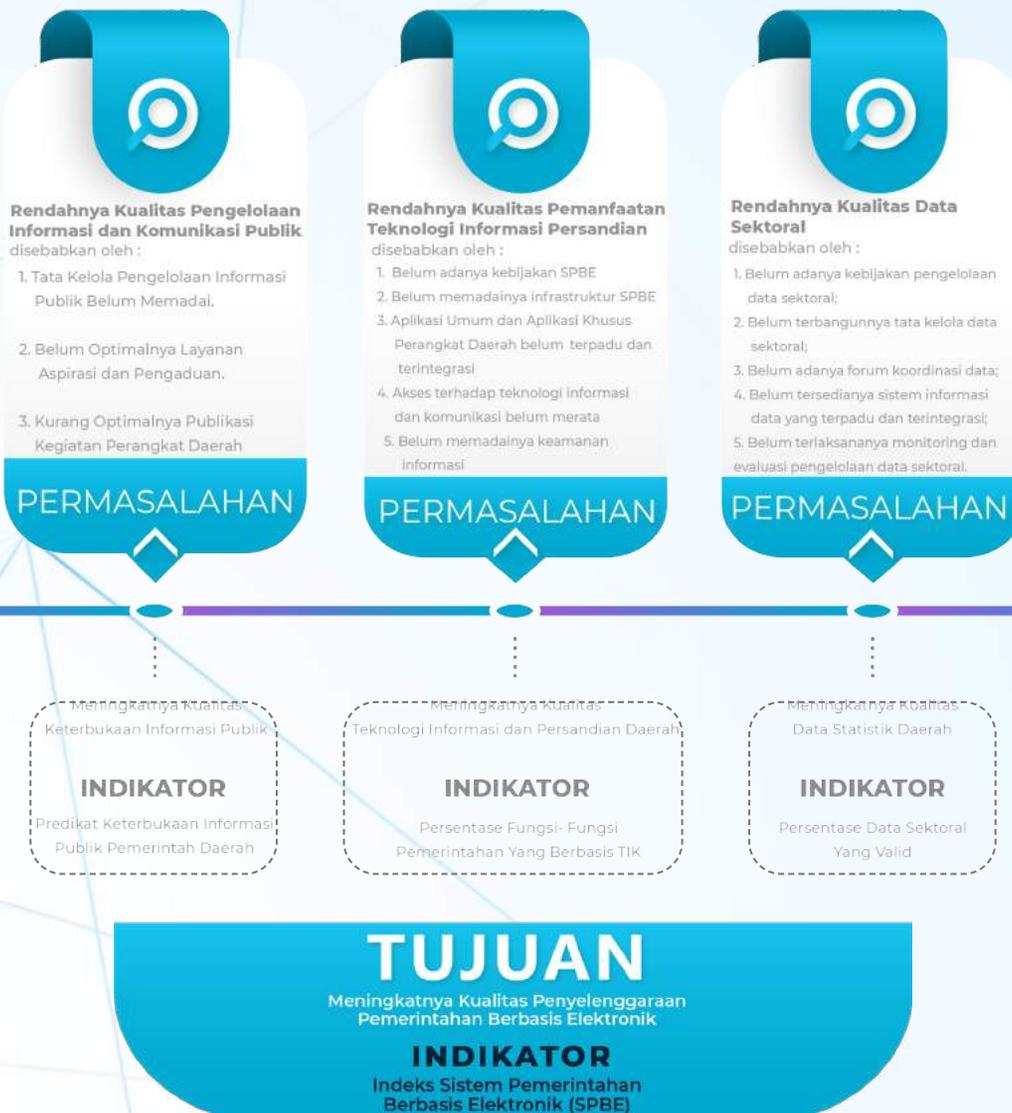
BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024, maka Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (KominfoSP) Kabupaten Polewali Mandar menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024. Renstra dimaksud berkedudukan sebagai dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari RPJMD di tingkat Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan serta pendanaan indikatif dan dilengkapi dengan tolok ukur pencapaiannya yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 serta memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta faktor penghambat dan pendorong, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024, dirumuskan sebagai berikut :





Untuk mengetahui dan mengukur capaian Tujuan dan Sasaran Strategis dimaksud, maka perlu menentukan indikator kinerja Tujuan dan Sasaran. Penentuan indikator kinerja tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu : specific (jelas), measurable (dapat diukur), agreeable (dapat disetujui), realistic (dapat dicapai), time bounded (memiliki batas waktu pencapaian) dan continuously improved (perbaikan berkelanjutan). Indikator kinerja tujuan dan sasaran merupakan indikator di level outcome (hasil). Indikator Sasaran Strategis dimaksud selanjutnya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Di samping IKU dimaksud, disusun pula indikator sasaran strategis penunjang pencapaian IKU.

Dengan mengamati kondisi saat ini dan mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki serta peluang dan kekuatan yang ada, maka ditetapkan pencapaian target pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis Organisasi melalui Forum Rapat Bersama, dengan penentuan target sebagai berikut :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-						
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik		Indeks SPBE	2,71	2,91	3,11	3,5	3,5	3,5	
			Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah	Cukup Informatif	Menuju Informatif	Informatif	Informatif	Informatif	Informatif
			Meningkatnya kualitas teknologi informasi dan persandian daerah	Persentase fungsi-fungsi pemerintahan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi	37%	51%	58%	64%	77%	77%
			Meningkatnya kualitas data statistik daerah	Persentase Data Sektoral yang valid	35%	50%	55%	75%	85%	85%
2.	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan		Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	
			Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	A	A	A	A
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Opini Pengelolaan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Tabel. 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2019-2024

PERJANJIAN KINERJA 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja

aparatur dan sebagai dasar pemberian penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment).

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian telah menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2021 sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada, dan merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2021. Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2021, sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1 :

- Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator :

- Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Target :

- Menuju Informatif



Sasaran Strategis 2 :

- Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah

Indikator :

- Persentase Fungsi-fungsi Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Target :

- 50%

Sasaran Strategis 3 :

- Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah

Indikator :

- Persentase Data Sektoral Yang Valid

Target :

- 68%

Sasaran Strategis 4 :

- Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Target :

- Baik

Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat/ Stakeholder

Sasaran Strategis 5 :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

Target :

- A

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran Strategis 6 :

- Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator :

- Opini Pengelola Keuangan

Target :

- WTP



Untuk mencapai sasaran tersebut, Dinas KominfoSP Tahun 2021 mengagendakan sejumlah Program dengan alokasi anggaran masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2
Program dan Alokasi Anggaran Tahun 2021

Sasaran Strategis	Program	Anggaran
Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Program Peningkatan kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 342.282.714,-
Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah	Program Peningkatan Kualitas Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Persandian	Rp. 982.869.800,-
Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah	Program Peningkatan kualitas Data Statistik Daerah	Rp. 46.850.400,-
Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran		
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Program Manajemen Perkantoran	Rp. 3.230.527.778,-
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah		
Jumlah		Rp.6.115.339.202,-

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2021

Pengukuran pencapaian kinerja Dinas KominfoSP tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan rencana target kinerja dengan realisasi, kemudian membandingkan capaian kinerja tahun 2021 dengan capaian kinerja pada tahun-tahun sebelumnya, dan membandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP Tahun 2019-2024. Pada bagian ini diungkapkan pula analisis keberhasilan atau kegagalan pencapaian target, kendala yang dihadapi, analisis efisiensi sumber daya yang dilakukan serta program dan kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja.



Sasaran Strategis 1 :

Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik

Indikator :

- Predikat Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Daerah

Target :

- Menuju Informatif (81,00)

Berdasarkan hasil pengukurannya tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran strategis I digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	Predikat Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (81,00)	Menuju Informatif (87,65)	10,2%

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis I Tahun 2021

Sesuai hasil pengukuran kinerja pada sasaran strategis I, predikat keterbukaan informasi publik melebihi target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja 2021, yaitu dari target menuju informatif (89,43%) terealisasi menuju informatif (81,00%).

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang diikuti dengan peraturan pelaksanaannya sebagaimana tertuang dalam PP Nomor 61 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, mengisyaratkan pentingnya membangun keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Disamping regulasi dimaksud, keterbukaan informasi juga merupakan bagian penting dalam rangka menumbuhkan kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah yang pada akhirnya akan menumbuhkan partisipasi publik dan berdampak pula pada pertumbuhan investasi di daerah.

Untuk mengetahui kualitas keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Daerah dapat berpedoman pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi

Publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, setiap tahun Komisi Informasi Pusat dan Propinsi menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi publik dan ditindaklanjuti dengan pemberian predikat keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan Komisi Informasi Propinsi Sulawesi Barat belum pernah menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terkait implementasi keterbukaan informasi publik, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, melalui Dinas KominfoSP melakukan monitoring dan evaluasi secara mandiri, dengan mengacu pada Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Tehnik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik. Berdasarkan hasil pengisian Kuisisioner Mandiri, maka predikat keterbukaan informasi publik, diklasifikasikan sebagai berikut :

- nilai 97 – 100 : Informatif
- nilai 80 – 96 : Menuju Informatif
- nilai 60 – 79 : Cukup Informatif
- nilai 40 – 59 : kurang informatif
- nilai < 39 : tidak informatif

Penilaian dan pembobotan terhadap implementasi keterbukaan informasi publik, dilaksanakan sebagai berikut :

Nomor	Variabel Penilaian	Persentase
1	Pengumuman melalui Website	25%
2	Pelayanan Informasi 2.1 - Informasi Wajib berkala 2.2 - Informasi Tersedia Setiap Saat 2.3 - Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan	30%
3	Pendokumentasian	25%
4	Pelayanan Informasi	20%
	Total	100%

Berikut ini disajikan Capaian Evaluasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik, sebagai berikut :

a). Pengumuman Melalui Website

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2021	NILAI
1	Aksesabilitas Website		
1,1	Memiliki web/situs/porta/khusus PPID/	www.ppid.polmankab.go.id	100
1,3	Mengumumkan program dan kegiatan yang sedang dijalankan badan publik tahun 2021	RPJMD 2019 RKPD 2021 Ringkasan APBD 2021	100
2	Konten		
2,1	Mengumumkan Informasi mengenai Profil singkat PPID, struktur dan tugas PPID	Ada Lengkap	100
2,2	Tata Cara Permohonan Informasi, Pengajuan Keberatan dan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi	Ada Lengkap	100
2,3	Portal PPID memiliki (kanal) Regulasi berkenaan Peraturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik dan atau Peraturan Lain	Ada Lengkap	100
2,4	Portal PPID Saudara memiliki aplikasi/tool yang dapat menerima Permohonan Informasi dan pengajuan Keberatan secara online	Ada Lengkap	100
2,5	Memiliki saluran akun PPID media sosial (Twitter/Instagram/Youtube/Facebook)	Belum Ada	0
2,6	Mengaktifkan kolom komentar pada setiap konten informasi yang diunggah	Ada Lengkap	100
2,7	Mengumumkan Daftar Informasi Publik berkala, serta merta, setiap saat dan yang dikecualikan	Ada Sebagian Besar	75
3	Inovasi Pengembangan Layanan Publik		
3,1	Memiliki layanan publik yang memberi hak akses publik tentang: Perencanaan Program dan Anggaran dan Realisasi Anggaran Real Time	Ada Lengkap	100
3,2	Memiliki aplikasi layanan publik berbasis mobile (android, linux, apple, dll)	Layanan Perizinan	100
Jumlah			90,38

b). Penyediaan Informasi

- Informasi Wajib Berkala

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2021	NILAI
1	Informasi Profil Badan Publik		
1,1	Mengumumkan informasi terkait alamat lengkap Badan Publik, dengan mencakup nama jalan, nomor, kota/kab, provinsi, kode pos, no.tlp/fax dan alamat email/webmail	Ada Sebagian	50
1,2	Mengumumkan informasi visi dan misi Badan Publik	Ada Lengkap	100
1,3	Mengumumkan informasi terkait struktur organisasi Badan Publik sampai dengan tiga tingkat dibawah	Ada Lengkap	100
1,4	Mengumumkan informasi terkait tugas dan fungsi Badan Publik	Ada Lengkap	100
2	Informasi Profil Pimpinan Badan Publik		
2,1	Mengumumkan informasi terkait profil singkat pimpinan dan/atau pejabat struktural Badan Publik tiga level ke bawah yang mencakup sekurang-kurangnya nama, jabatan, pendidikan dan penghargaan yang pernah diterima	Ada Sebagian	50
2,2	Mengumumkan LHKPN terakhir Pimpinan Daerah yang telah diperiksa KPK, atau telah menyerahkan LHKPN/LHKASN kepada KPK disertai tanda bukti kirim.	Belum Ada	0
3	Informasi Kegiatan dan Kinerja Badan Publik		
3,1	Mengumumkan informasi tentang program/kegiatan yang telah dijalankan di Tahun 2021 yang memuat: Nama Program/Kegiatan, Penanggung Jawab/Pelaksana Program, Jadwal kegiatan/program, Target capaian atau penyerapan, dan Sumber dan besaran anggaran	Ada Sebagian Besar	75
3,2	Mengumumkan kerangka acuan kerja (KAK/TOR) kegiatan sesuai dengan program/kegiatan tahun 2021	Belum Ada	0
3,3	Mengumumkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4	Informasi Keuangan Badan Publik		
4,1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,2	Neraca Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,3	Catatan atas laporan keuangan (CALK) Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,4	Daftar asset dan inventaris daerah Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,5	Ringkasan APBD Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,6	Ringkasan Perubahan APBD Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,7	Ringkasan APBD Tahun 2021	Ada Lengkap	100

4,8	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran (RKA OPD) Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,9	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) OPD Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,10	Ringkasan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,11	Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun 2021	Ada Lengkap	100
4,12	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,13	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,14	Laporan Arus Kas (LAK) Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,15	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang sudah diaudit Tahun 2020	Ada Lengkap	100
4,16	Opini BPK-RI atas LKPD Tahun 2020	Ada Lengkap	100
5	Informasi Laporan Akses Informasi Badan Publik		
5,1	Jumlah permohonan informasi publik yang diterima	Ada Lengkap	100
5,2	Mengumumkan Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik	Ada Lengkap	100
5,3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan sebagian atau seluruhnya	Ada Lengkap	100
5,4	Alasan penolakan permohonan informasi publik	Ada Lengkap	100
6	Informasi mengenai Hak Memperoleh Informasi di Badan Publik		
6,1	Mengumumkan Tata Cara memperoleh informasi publik	Ada Lengkap	100
6,2	Mengumumkan Tata Cara Mengajukan Keberatan atas Permohonan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
6,3	Mengumumkan prosedur permohonan sengketa informasi	Ada Lengkap	100
6,3	Menyediakan form permohonan dan keberatan	Ada Lengkap	100
7	Informasi mengenai Pengadaan Barang dan Jasa Badan Publik		
6,3	Menyediakan dan Mengumumkan informasi tentang pengadaan barang dan jasa Tahun 2020 yang sekurang-kurangnya memuat :1). Nama lelang, 2). Tanggal pembuatan, 3). Lingkup Pekerjaan, 4) Tahapapan Lelang,5) Metode Pengadaan, 6). Tahun anggaran, 7). Nilai Pagu Paket dan HPS, 8). Lokasi Pekerjaan, 9). Syarat Kualifikasi.	Belum Ada	0

8	Informasi mengenai Regulasi Badan Publik		
8,1	Mengumumkan Daftar Rancangan Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang akan dikeluarkan/ditetapkan	Belum Ada	0
8,2	Mengumumkan daftar peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah ditetapkan	Ada Lengkap	100
Jumlah			76,39

- Informasi Tersedia Setiap Saat

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2021	NILAI
1	Perki 1/2010 tentang SLIP menetapkan 6 (enam) jenis informasi publik berkaitan dengan Peraturan, Keputusan, dan/atau Kebijakan Badan Publik. Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan seluruh/sebagian jenis-jenis informasi publik dimaksud.		
1,1	Dokumen pendukung dalam bentuk naskah akademis, kajian atau pertimbangan atas kebijakan yang telah ditetapkan Tahun Anggaran 2020	Belum Ada	0
1,2	Masukan-masukan dari berbagai pihak atas peraturan, keputusan dan kebijakan Tahun Anggaran 2019	Belum Ada	0
1,3	Rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan Tahun Anggaran 2020	Belum Ada	0
1,4	Risalah rapat dari proses pembentukan peraturan, keputusan atau kebijakan Tahun Anggaran 2020	Belum Ada	0
1,5	Tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan Tahun Anggaran 2020	Belum Ada	0
1,6	Peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan Tahun Anggaran 2020	Ada Lengkap	100
2	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi mengenai surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga yang dilengkapi dengan dokumen pendukung.		
2,1	Dokumen tentang Memorandum of Understanding/ Lol/ Nota Kesepahaman/ Nota Kerjasama/sejenisnya berikut dokumen pendukungnya Tahun Anggaran 2021	Ada Lengkap	100
2,1	Dokumen pengadaan barang dan jasa lengkap dengan pendukungnya, termasuk kontrak/SPK Tahun Anggaran 2020 & 2021.	Ada Lengkap	100

3	Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan Informasi-informasi tentang organisasi, administrasi dan kepegawaian sebagaimana dibawah ini.		
3,1	Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil dan keuangan	Ada Sebagian	50
3,2	Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, sejarah karir atau posisi, sejarah pendidikan dan penghargaan yang pernah diraih	Ada Sebagian Besar	75
3,3	Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran secara khusus unit pelaksana teknis serta laporan keuangannya.	Ada Lengkap	100
3,4	Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.	Ada Sebagian Besar	75
4	Apakah Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan atau menyediakan dokumen-dokumen keuangan dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir		
4,1	Laporan realisasi anggaran	Ada Lengkap	100
4,2	Neraca	Ada Lengkap	100
4,3	Catatan atas laporan keuangan (CALK)	Ada Lengkap	100
4,4	Daftar asset dan inventaris	Ada Lengkap	100
4,5	Perda APBD	Ada Lengkap	100
4,6	Perda APBD Perubahan	Ada Lengkap	100
4,7	RKA OPD	Ada Lengkap	100
4,8	DPA OPD	Ada Lengkap	100
4,9	RKA PPKD	Ada Lengkap	100
4,10	DPA PPKD	Ada Lengkap	100
4,11	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) seluruh OPD	Ada Lengkap	100
4,12	Laporan Realisasi Anggaran (LRA) LRA PPKD	Ada Lengkap	100
4,13	LKPD (audited)	Ada Lengkap	100
4,14	Opini BPK-RI atas LKPD	Ada Lengkap	100
4,15	Laporan Arus Kas	Ada Lengkap	100
5	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai atau menyediakan Informasi tentang hal-hal berikut ini.		
5,1	Syarat-syarat perizinan	Ada Lengkap	100
5,2	Izin yang diterbitkan dan/atau dikeluarkan	Ada Lengkap	100
5,2	Dokumen pendukung izin yang diterbitkan/ dikeluarkan	Ada Lengkap	100

6	Badan Publik Saudara memiliki, menguasai dan menyediakan Informasi mengenai laporan pelayanan informasi publik		
6,1	Dokumen kegiatan pelayanan Informasi Publik yang memuat sarana prasarana, SDM, anggaran dan penggunaan anggaran Tahun 2020	Ada Sebagian	50
7	Kegiatan Pelayanan Informasi Publik		
7,1	Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya	Ada Lengkap	100
7,2	Sumber daya manusia yang menangani layanan informasi publik beserta kualifikasinya	Ada Sebagian	50
7,3	Anggaran layanan informasi publik beserta laporan penggunaannya	Ada Sebagian	50
8	Informasi Lain-lain		
8,1	Memiliki dan menyediakan Informasi tentang rencana strategis dan rencana kerja	Ada Lengkap	100
8,2	Memiliki dan menyediakan data aset atau inventaris Tahun Anggaran 2020	Ada Lengkap	100
Jumlah			76,39

- *DIP dan Informasi yang dikecualikan*

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2021	NILAI
1	Daftar Informasi Publik		
1,1	Menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2020	Ada Lengkap	100
1,2	Daftar Informasi Publik PPID Utama	Ada Lengkap	100
1,3	Daftar Informasi Publik PPID Pembantu	Ada Sebagian Besar	75
1,4	Menetapkan SOP Penyusunan DIP	Ada Lengkap	100
1,5	DIP disusun menguraikan ringkasan dan detail substansi setiap jenis informasi	Ada Lengkap	100
1,6	Daftar Informasi Publik ditetapkan oleh Atasan PPID disertai dengan SK Penetapan	Ada Lengkap	100
1,7	DIP dilakukan pembaharuan berkala (updating)	Ada Sebagian	50
2	Informasi Dikecualikan		
2,1	Daftar Informasi Publik yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
2,2	PPID melakukan uji konsekuensi informasi yang dikecualikan	Ada Lengkap	100
2,3	Hasil uji konsekuensi ditetapkan dalam bentuk surat keputusan yang ditanda tangani Atasan PPID	Ada Lengkap	100
2,4	Memiliki dan menyediakan naskah pertimbangan hasil uji konsekuensi	Ada Lengkap	100
Jumlah			93,18

c). Pendokumentasian

No.	Pertanyaan	Data Pendukung	NILAI
1	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi		
1,1	Apakah Badan Publik telah menunjuk PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang?	Ada Lengkap	100
1,2	Apakah tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik saudara tertuang dalam bentuk Peraturan/Keputusan?	Ada Lengkap	100
1,3	Apakah Badan Publik Saudara telah memiliki struktur/bagan PPID yang tertuang dalam Peraturan/Keputusan?	Ada Lengkap	100
2	Koordinasi PPID dengan satuan/unit kerja di Badan Publik		
2,1	Apakah ada koordinasi yang dilakukan secara rutin dan terjadwal?	Ada Lengkap	100
2,2	Apakah ada pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi?	Ada Sebagian Besar	75
3	Tata Kelola Pendokumentasian Informasi		
3,1	Apakah Badan Publik anda memiliki SOP dalam penyimpanan informasi dan dokumentasi?	Ada Lengkap	100
3,2	Apakah badan publik anda menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk manual?	Ada Lengkap	100
3,3	Apakah badan publik anda menyimpan informasi dan dokumentasi dalam bentuk digital?	Ada Lengkap	100
3,4	Apakah penyimpanan informasi dan dokumentasi memiliki Ruang Arsip tersendiri?	Ada Sebagian	50
3,5	Apakah Badan Publik anda memiliki anggaran tetap dalam penatausahaan dan penyimpanan informasi?	Ada Sebagian	50
Jumlah Nilai			90

d). Pelayanan Informasi

No.	Pernyataan	Kondisi Tahun 2021	NILAI
1	Peraturan Pelayanan Informasi Publik		
1,1	Memiliki Peraturan Bupati/Walikota tentang Pelayanan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
1,2	Keputusan Bupati/Walikota tentang PPID Utama dan PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
1,3	Peraturan/Keputusan mengenai Tugas dan fungsi PPID pada Badan Publik	Ada Lengkap	100
2	Memiliki SOP tentang Tata Kelola Informasi Publik		
2,1	SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik	Ada Lengkap	100

2,2	SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2,3	SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2,4	SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik	Ada Lengkap	100
2,5	SOP Fasilitasi Sengketa Informasi	Ada Lengkap	100
3	Aktivitas PPID		
3,1	Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
3,2	Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu	Ada Lengkap	100
3,3	Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan	Ada Sebagian Besar	75
3,4	Memiliki agenda rutin dan terjadwal kegiatan PPID Utama dengan PPID Pembantu terkait:	Ada Sebagian Besar	75
3,5	Penyusunan dan Penetapan Daftar Informasi Publik	Ada Lengkap	100
3,6	Uji Konsekuensi	Ada Lengkap	100
3,7	Membuat laporan layanan informasi publik ke Komisi Informasi secara berkala	Ada Lengkap	100
3,8	Melakukan sinergitas PPID dengan Pimpinan daerah	Ada Sebagian Besar	75
4	Pelayanan Informasi		
4,1	Menyediakan ruang khusus pelayanan informasi lengkap dengan meja, kursi, kursi tunggu dan sarana penerimaan serta komputer (desk information) yang mudah di akses publik	Ada Sebagian Besar	75
4,2	Ada Petugas khusus yang melayani informasi Publik	Ada Lengkap	100
4,3	Menyediakan Informasi Publik pada Papan pengumuman informasi	Ada Sebagian	50
4,4	Memiliki anggaran tetap bagi tata kelola informasi publik	Ada Sebagian	50
4,5	Apakah memiliki Ruang Khusus PPID	Ada Sebagian	50
4,6	Apakah memiliki Meja layanan Informasi Publik	Ada Lengkap	100

Jumlah Nilai

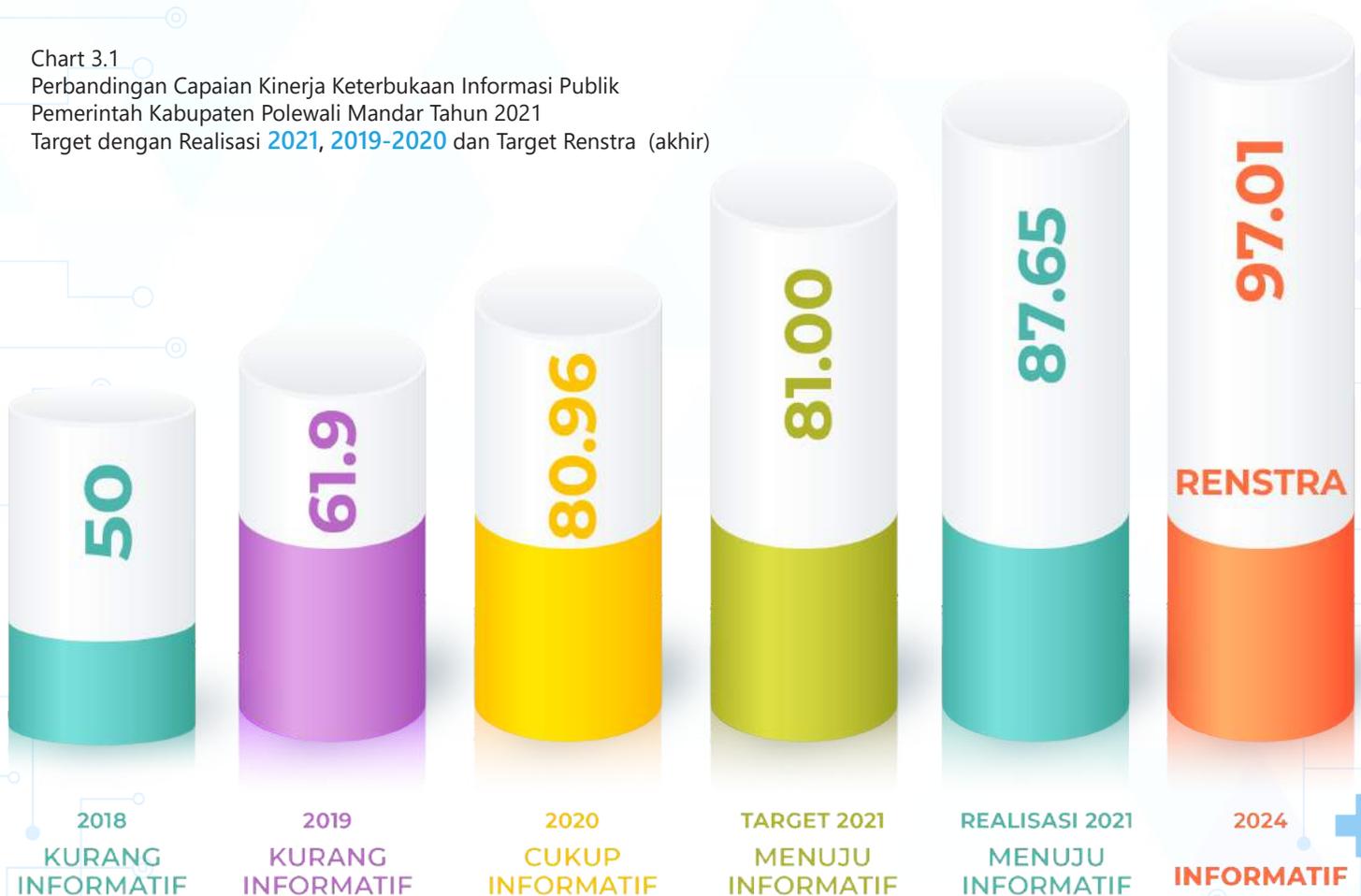
89,77



REKAPITULASI

No.	Variabel Penilaian	Persentase	Nilai	Hasil
1.	Pengumuman melalui Website	25%	90,38	22,60
2.	Pelayanan Informasi	30%	81,99	24,60
2.1 -	Informasi Wajib berkala		76,39	
2.2 -	Informasi Tersedia Setiap Saat		76,39	
2.3 -	Daftar Informasi Publik dan Informasi Dikecualikan		93,18	
3.	Pendokumentasian	25%	90	22,5
4.	Pelayanan Informasi	20%	89,77	17,95
Total				87,65
PREDIKAT : MENUJU INFORMATIF				

Chart 3.1
Perbandingan Capaian Kinerja Keterbukaan Informasi Publik
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021
Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)



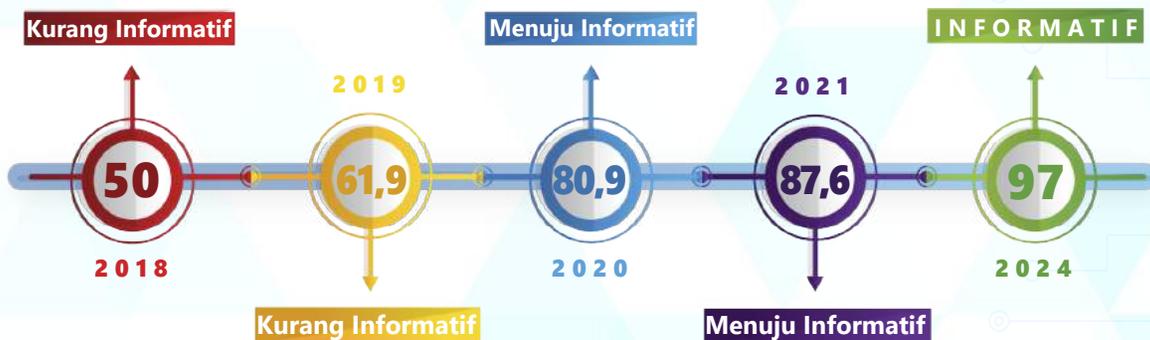
*Sumber : Bidang IKP Dinas KominfoSP, Januari 2022



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan dengan target, capaian kinerja tahun 2021 mencapai 108,2 %. Selanjutnya kondisi capaian 2021 ini meningkat sebesar 37,65% dari kondisi tahun 2018 yang saat itu predikat keterbukaan informasi publik kurang informatif (50%). Predikat keterbukaan informasi publik tahun 2019 juga masih pada level kurang informatif (61,9%). Hal ini dipengaruhi belum optimalnya pemanfaatan aplikasi e-PPID oleh Perangkat Daerah dalam menyediakan data dan informasi terkait pengelolaan informasi publik. Predikat keterbukaan informasi publik cukup informatif mengalami peningkatan pada tahun 2020 (80,96%). Capaian ini dipengaruhi peningkatan pemahaman PPID terkait pentingnya ketersediaan data dan informasi dalam pengelolaan informasi publik serta tersedianya website yang sesuai standar dan link dengan website Pemerintah

Kabupaten. Kondisi ini didukung dibentuknya admin e-PPID dan Website pada setiap Perangkat Daerah. Tahun 2021, terjadi peningkatan keterbukaan informasi publik pada level menuju informatif (87,65%). Kinerja PPID utama dalam melakukan pendampingan kepada PPID pembantu pada Perangkat Daerah serta adanya monitoring evaluasi secara berkala setiap triwulan tahun berjalan terhadap data dan informasi yang dikelola melalui aplikasi e-PPID dan Website Perangkat Daerah turut memberikan pengaruh yang cukup signifikan.

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi predikat informatif (97,01), maka kondisi saat ini sudah mencapai 90,35%. Capaian ini, dapat digambarkan dengan milestone sebagai berikut :



Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

1. Adanya regulasi terkait keterbukaan informasi publik, yang meliputi tata kelola informasi publik, daftar informasi publik, dan admin e-PPID
2. Pendampingan berkelanjutan website Perangkat Daerah agar terintegrasi dengan www.polmankab.go.id dengan tata kelola yang memenuhi standar penyediaan informasi publik
3. Adanya aplikasi e-PPID yang memudahkan perangkat daerah dan publik dalam mengelola dan memperoleh informasi publik

Faktor Penghambat :

1. Kurang optimalnya komitmen jajaran pemangku jabatan struktural dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi publik, utamanya aspek digitalisasi informasi dan dokumen publik
2. Kurang optimalnya sosialisasi ke masyarakat dalam memperoleh informasi dan dokumen publik sesuai standar prosedur utamanya akses secara elektronik
3. Kurang optimalnya kinerja PPID utama dan PPID Pembantu dalam pemenuhan standar pelayanan IP

Alternatif Solusi yang telah diupayakan :

- Internalisasi dan pendampingan berkelanjutan PPID Pembantu dalam pengelolaan informasi publik termasuk pengelolaan website perangkat daerah yang terintegrasi dengan www.polmankab.go.id.
- Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi dan komunikasi melalui website dan aplikasi PPID
- Meningkatkan kualitas peliputan dan penyebarluasan kegiatan pemerintahan dan pembangunan melalui channel polewalimandartv dan akun media sosial
- Peningkatan kualitas pengelolaan Aplikasi LAPOR melalui internalisasi dan pendampingan Admin Pengelola LAPOR di setiap Perangkat Daerah

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota	Rp. 1.723.568.224,-	1.439.375.024,-	83,51
a. Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 1.664.490.500,-	Rp. 1.380.317.300,-	82,93
b. Pelayanan Informasi Publik	Rp. 42.642.900,-	Rp. 42.642.900,-	100
c. Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Rp. 16.434.824,-	Rp. 16.414.824,-	99,88



Sasaran Strategis 2 :

Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah

Indikator :

Persentase Fungsi-fungsi Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi

Target :

● 50%

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran Strategis 2, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah	Persentase Fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis TIK	50%	54,17%	108,3%

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis II Tahun 2021

Sebagaimana tertuang dalam Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Electronic (SPBE) bahwa sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi baik dalam aspek kebijakan, tata kelola maupun dalam aspek layanan pemerintahan. Pada aspek layanan sebagai implementasi dari kebijakan (komitmen) dan tata kelola, maka Pemerintah Daerah dapat mengembangkan aplikasi sebagai tools untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam hal pelayanan publik. Pengembangan dimaksud baik berupa

aplikasi yang bersifat umum berbagi pakai maupun bersifat khusus sesuai kekhususan dari penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Namun dalam pengembangan dan pemanfaatan aplikasi dimaksud perlu memperhatikan aspek integrasi dan interoperabilitas sistem informasi untuk mencegah adanya pemborosan pengelolaan sistem informasi.

Berdasarkan hasil pemetaan tahun 2021, maka diketahui kondisi fungsi-fungsi utama Pemerintahan Daerah yang didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi, sebagai berikut :



Tabel 3.3
Pemetaan Fungsi-fungsi Utama Pemerintahan
Yang telah didukung Teknologi Sistem Informasi Tahun 2021

No	Fungsi-fungsi Utama Perangkat Daerah	Aplikasi Yang Digunakan
1	SEKRETARIAT DAERAH	
1	fungsi Tata Pemerintahan	-
2	fungsi Kesejahteraan Rakyat	-
3	fungsi Hukum	JDIH, JDIH integrasi JDIHN
4	fungsi Administrasi Pembangunan	-
5	fungsi Pengadaan Barang Dan Jasa	SiRUP, LPSE
6	fungsi Perekonomian Dan SDA	-
7	fungsi Organisasi	-
	- fungsi kelembagaan	e-sakip,
	- fungsi pelayanan publik	Sistem Informasi Pelayanan Publik, e-Survei Kepuasan Pelayanan Publik
	- fungsi reformasi birokrasi	e-PMPRB, SKP Online
8	fungsi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	-
2	SEKRETARIAT DPRD	
1	fungsi Risalah dan Persidangan	JDIH DPRD
2	fungsi Hubungan Masyarakat	-
3	INSPEKTORAT	
1	Fungsi Pengawasan	SIMWAS, e-WBS
2	Fungsi Audit	e-Auditee
3	Fungsi Review	e-review SAKIP OPD
4	Fungsi Pemantauan Tindak Lanjut	SimHPPemda
4	BALITBANGREN	
1	fungsi penelitian dan pengembangan	-
2	fungsi Perencanaan Dan Pengendalian Program	SIPD Perencanaan
5	BADAN KEUANGAN	
1	fungsi Anggaran	SIPD Penganggaran
2	fungsi Verifikasi Dan Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
3	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
4	fungsi Aset	SIMDA Aset
6	BKPP	
1	fungsi Pengadaan, Informasi Kinerja Pegawai	SIMPEG, e-LAPKIN
2	fungsi Administrasi Kepegawaian	SAPK
3	fungsi Pendidikan Dan Pelatihan	-
7	BADAN KESBANG POL	
1	fungsi Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa Serta Ketahanan Ekonomi Sosial & Budaya	-
2	fungsi Politik Dalam Negeri	-
3	fungsi Organisasi Kemasyarakatan, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional	-
8	BPBD	
1	fungsi Pencegahan Dan Kesiapsiagaan	-
2	fungsi Kedaruratan Dan Logistik	-
3	fungsi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi	-
9	BADAN PENDAPATAN	
1	fungsi Perencanaan, Perhitungan dan Penetapan Pendapatan	SIMPADU
2	fungsi Penagihan	SIMPADU
3	fungsi Pembinaan, Pengawasan, Pembukuan	SIMPADU

		dan Pelaporan	
10	DINAS KESEHATAN		
1	fungsi Kesehatan Masyarakat		SIM Gizi Terpadu
2	fungsi Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit		SIM Tuberculosis Terpadu
3	fungsi Pelayanan Kesehatan		SIM Rujukan terpadu
4	fungsi Sumber Daya Kesehatan		SIM Data Kefarmasian
11	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	fungsi Penegakan Peraturan Perundang-Undangan		-
2	fungsi Ketertiban Umum Dan Ketentraman		-
3	fungsi Sumber Daya Aparatur		-
4	fungsi Perlindungan Masyarakat		-
12	DIKNASBUD		
1	fungsi Pendidikan Dan Pengajaran		DAPODIKDas
2	fungsi Sarana Dan Prasarana		DAPODIKDas
3	fungsi Pengembangan Mutu Pendidikan		DAPODIKDas
4	fungsi PAUD dan Pendidikan Masyarakat		DAPODIK PAUD & DIKMAS
5	Kepala fungsi Kebudayaan		DAPOBUD
13	DINAS KOMINFO, STATISTIK & PERSANDIAN		
1	fungsi Teknologi Informasi		Pusat Data (Server), Sistem Informasi Manajemen pengetahuan
2	fungsi Statistik		Polman Satu Data
3	fungsi Informasi & Komunikasi publik		e-PPID, LAPOR!
4	fungsi Persandian		Sanapati
14	DINAS SOSIAL		
1	fungsi Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin		-
2	fungsi Perlindungan Dan Jaminan Sosial		e-PKH
3	fungsi Rehabilitasi Sosial		-
15	DINAS TRANSMIGRASI TENAGA KERJA & ESDM		
1	fungsi Perencanaan, Fasilitasi Pertanahan, Transmigrasi dan ESDM		-
2	fungsi Pembangunan, Penempatan dan Pengembangan Transmigrasi		-
3	fungsi Tenaga Kerja		-
16	PENANAMAN MODAL & PTSP		
1	fungsi Penanaman Modal		
2	fungsi Pelayanan Pendaftaran Perizinan dan Non Perizinan		OSS, SiCantik, Masiga
3	fungsi Peninjauan dan Penetapan		OSS, SiCantik, Masiga
17	DP2KBP2A		
1	fungsi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan Dan Penggerakan		-
2	fungsi Keluarga Berencana, Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga		-
3	fungsi Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak		-
18	DINAS LINGKUNGAN HIDUP & KEHUTANAN		
1	fungsi Penataan Dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup		-
2	fungsi Pengelolaan Limbah dan Pengendalian Pencemaran		-
3	fungsi Kebersihan dan Pertamanan		-

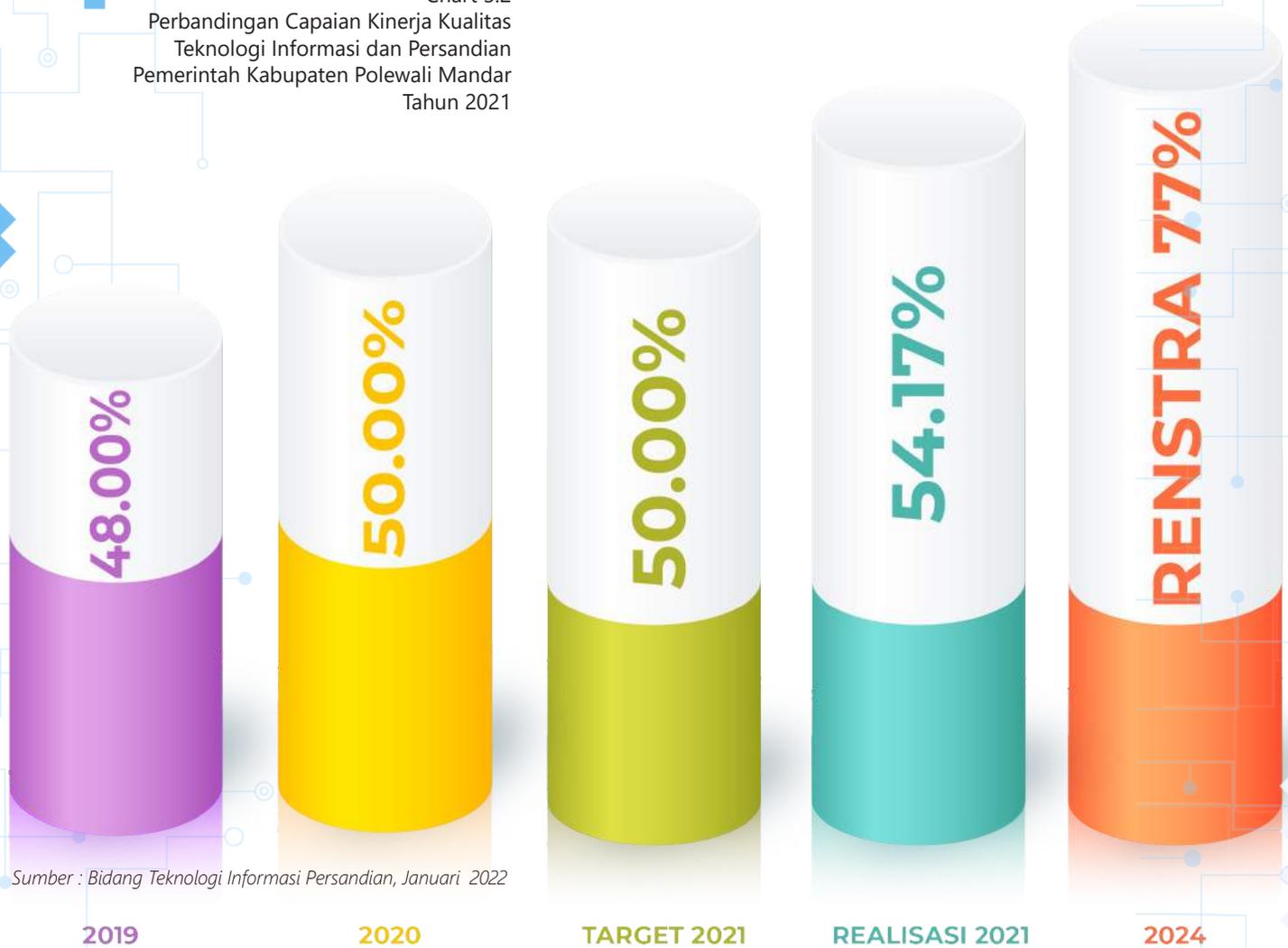
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA	
1	fungsi Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Pembangunan Desa	-
2	fungsi Pemerintahan Desa	SISPEMDES
3	fungsi Usaha Ekonomi Desa Dan Pendayagunaan SDA Dan Teknologi Tepat Guna	-
20	DINAS PERHUBUNGAN	
1	fungsi Pengembangan Perhubungan	-
2	fungsi Lalu Lintas	-
3	fungsi Angkutan	KIR online
21	DINAS PERTANIAN & PANGAN	
1	fungsi Tanaman Pangan Dan Hortikultura	-
2	fungsi Peternakan	-
3	fungsi Perkebunan	-
4	fungsi Pengembangan Sdm	SIMLUH
5	fungsi Prasarana Dan Sarana Pertanian	-
6	fungsi Ketahanan Pangan	-
22	DINAS PEMUDA & OLAH RAGA	
1	fungsi Pemuda	-
2	fungsi Olah Raga	-
3	fungsi Usaha Pariwisata	-
4	fungsi Promosi Wisata	-
23	DINAS PERINDAGKOP & UKM	
1	fungsi Perindustrian	-
2	fungsi Perdagangan	-
3	fungsi Standarisasi Perlindungan Konsumen	-
4	fungsi Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	-
24	DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN, PERTANAHAN	
1	fungsi Permukiman	SIMPERUM
2	fungsi Pertanahan	-
3	fungsi Perumahan	SIMPERUM
25	DINAS PU & PENATAAN RUANG	
1	fungsi Sumber Daya Air	-
2	fungsi Bina Marga	-
3	fungsi Cipta Karya	-
4	fungsi Bina Konstruksi	-
5	fungsi Penataan Ruang	-
26	DISDUK CAPIL	
1	fungsi Pelayanan Pendaftaran Penduduk	SIAK
2	fungsi Pelayanan Pencatatan Sipil	SIAK
3	fungsi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	SIAK
4	fungsi Pemanfaatan Data Dan Inovasi Pelayanan	SIAK
27	DINAS PERIKANAN & KELAUTAN	
1	fungsi Perikanan Budidaya	-
2	fungsi Perikanan Tangkap Dan Pesisir	-
3	fungsi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	-
4	fungsi Kelembagaan Dan Penyuluhan	-
28	DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN	
1	fungsi Pengembangan Perpustakaan Dan Pembudayaan Kegemaran Membaca	-
2	fungsi Pengolahan, Pelestarian Dan Pelayanan Perpustakaan	-
3	fungsi Kearsipan	Srikandi

29	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
1	fungsi Pelayanan Medis Dan Keperawatan	SIMRS
30	KESEKRETARIATAN PERANGKAT DAERAH	
1	Fungsi Perencanaan	SIPD
2	Fungsi Keuangan	SIMDA Keuangan
3	Fungsi Perbendaharaan	SIMDA Keuangan
4	fungsi Akuntansi	SIMDA Keuangan
5	fungsi Aset	SIMDA Aset
6	Fungsi Monitoring dan Pelaporan	SIPD
7	Fungsi Akuntabilitas Kinerja Organisasi	e-SAKIP
8	Fungsi Pelayanan Publik Perangkat Daerah	SIPP
9	Fungsi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	e-PMPRB Unit
10	Fungsi Pengukuran Kinerja Individu	SKP Online
11	Fungsi Disiplin Pegawai	e-Absensi
12	Fungsi Kepegawaian	SIMPEG
13	Fungsi Informasi Publik	e-PPID
14	Fungsi Pengaduan Publik	www.lapor.go.id
Jumlah	120	65
Persentase Fungsi-fungsi Pemerintahan yang berbasis Teknologi Sistem Informasi		54,17%



Target dengan Realisasi
2021, 2019-2020
dan Target Renstra (akhir)

Chart 3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas
Teknologi Informasi dan Persandian
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Tahun 2021



Sumber : Bidang Teknologi Informasi Persandian, Januari 2022

2019

2020

TARGET 2021

REALISASI 2021

2024



Mencermati chart tersebut di atas, maka apabila dibandingkan capaian realisasi 2021 dengan target 2021, maka kinerja Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian tahun 2021 mencapai 108,3 %. Selanjutnya kondisi capaian 2021 ini meningkat sebesar 6,17% dari kondisi tahun 2018 yang saat itu tingkat capaian 31,70%. Capaian persentase fungsi-fungsi utama pemerintahan berbasis teknologi informasi tahun 2019 (48,00%) dipengaruhi kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum memadai, disebabkan belum optimalnya pemahaman Perangkat Daerah tentang SPBE. Tahun 2020 terjadi peningkatan fungsi-fungsi utama pemerintahan berbasis teknologi informasi (50,00%). Adanya kebijakan SPBE, tersusunnya tata kelola SPBE, terlaksananya monitoring dan evaluasi implementasi SPBE Perangkat Daerah, serta telah disusunnya analisis kebutuhan aplikasi pemerintahan

memberi pengaruh nyata terhadap capaian ini. Terlaksananya Pendampingan pengembangan aplikasi pemerintahan berbasis tugas dan fungsi dan Optimalnya kapasitas akses internet Pemerintah Daerah secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja pada tahun 2021 (54,17%).

Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam RENSTRA 2019-2024 yaitu kondisi 77%, maka kinerja tahun 2021 sudah mencapai 70,35%.

Optimalnya pencapaian kinerja kualitas teknologi informasi ini juga didukung oleh semakin membaiknya kualitas bandwidth tahun 2021, sebagaimana terlihat pada chart berikut :

Tabel 3.4
Penataan Bandwitch Pemerintah Daerah Tahun 2019-2021

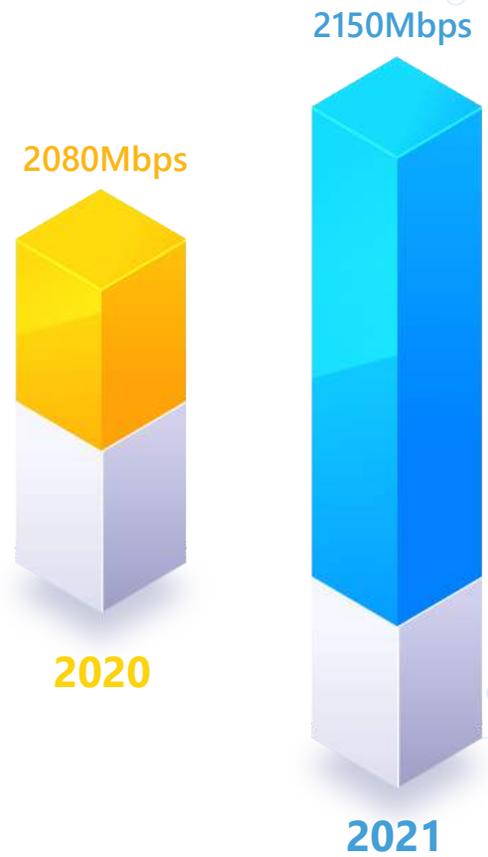
No.	OPD	BANDWITCH 2019	BANDWITCH 2020	BANDWITCH 2021
1	Ruang Kerja Bupati	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
2	Ruang Kerja Wabup	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
3	Ruang Kerja Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
4	Ass 1	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
5	Ass 2	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
6	Ass 3	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
7	Bagian Pemerintahan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
8	Bagian Kesra	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
9	Bagian Humas Dan Protokol	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
10	Bagian Ekonomi	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
11	Bagian Pembangunan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
12	Bagian Pengadaan Barang Jasa	5 Mbps+ Upto 50 Mbps,FO	5 Mbps+ Upto 50 Mbps,FO	5 Mbps+ Upto 50 Mbps,FO
13	Bagian Ortala	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
14	Bagian Hukum	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
15	Bagian Umum Dan Perlengkapan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
16	Staf Ahli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
17	Ruang Pola	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
18	Rujab Bupati	Upto 20 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO	Upto 80 Mbps, FO
19	Rujab Wakil	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
20	Rujab Sekda	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
21	Rumah Posko	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
22	Sekretariat Dprd	Upto 50 Mbps	Upto 50 Mbps	Upto 60 Mbps FO
23	Inspektorat	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
24	Bappeda Litbang	Upto 100 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO	Upto 130 Mbps, FO
25	Badan Keuangan	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 70 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 70 Mbps, FO
26	Badan Pendapatan	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 60 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 60 Mbps, FO
27	Bkpp	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO	3 Mbps+ Upto 50 Mbps, FO
28	Badan Kesbangpol	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
29	Bpbd	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO

30	Disdikbud	Upto 20 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
31	Dinkes	Upto 50 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO	Upto 70 Mbps, FO
32	Dinas Sosial	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
33	Dinas Pupr	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
34	Dinas Rumkimtan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
35	Disdukcapil	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
36	Dinas Pertanian P	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
37	Dinas Kelautan Perikanan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
38	Dlhk	Upto 20 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO	Upto 60 Mbps, FO
39	Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja	Upto 50 Mbps	Upto 40 Mbps	Upto 40 Mbps
40	Disperindagkop	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
41	Dispop	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
42	Dpmptsp	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO	Upto 50 Mbps, FO
43	Dpmd	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
44	Dp2kbp3a	Upto 50 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
45	Dinas Satpol Pp	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
46	Dinas Kominfo Sp	7 Mbps + wifi 100 Mbps	3 Mbps + Upto 60 Mbps,FO	3 Mbps + Upto 60 Mbps,FO
47	Dinas Perhubungan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
48	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	Upto 20 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO	Upto 40 Mbps, FO
49	Kec. Binuang	-	Upto 10 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
50	Kec.Polewali	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
51	Kec. Matakali	-	Upto 10 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
52	Kec. Wonomulyo	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
53	Kec. Mapilli	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
54	Kec. Balanipa	-	-	Upto 20 Mbps, FO
55	Kec. Tinambung	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
56	Kec. Anreapi	-	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
47	Kec. Tutar	-	-	-
58	Kec. Bulo	-	-	-
59	Kec. Matangnga	-	-	-
60	Kec. Campalagian	-	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
61	Kec. Luyo	-	-	-
62	Kec. Limboro	-	Upto 10 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
63	Kec. Tapango	-	Upto 20 Mbps, FO	Upto 20 Mbps, FO
64	Kec. Alu	-	-	-
Besaran Bandwith		1661 Mbps	2080 Mbps	2150 Mbps

Kapasitas Bandwitch meningkat pada tahun 2021 dari kapasitas 2080 Mbps Menjadi 2150 Mbps dengan kualitas fiber optic



Chart 3.3
Peningkatan Kapasitas Bandwitch Tahun 2020-2021

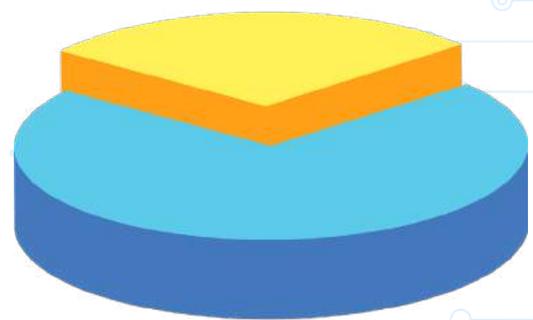


Alokasi Anggaran : Rp. 902.116.050

Dari aspek eksternal, Dinas KominfoSP mengupayakan pengurangan daerah blankspot agar masyarakat lebih mudah mengakses informasi dan komunikasi sehingga berbagai sistem informasi yang dikembangkan Pemerintah Daerah dapat diakses oleh masyarakat utamanya yang terkait dengan pelayanan publik dan perkembangan layanan pemerintahan dan pembangunan. Upaya ini difasilitasi melalui peningkatan kualitas layanan penerbitan rekomendasi pendirian Menara Telekomunikasi yang telah memenuhi syarat perizinan yang lengkap dan benar sesuai persyaratan perijinan dan sistem prosedur yang berlaku serta melakukan pengawasan menara utamanya terkait dengan pemenuhan kewajiban retribusi menara telekomunikasi.

Adapun kondisi blankspot dan pertumbuhan menara telekomunikasi, dapat dilihat pada chart berikut ini :

PERSENTASE 38%



PERSENTASE 62%

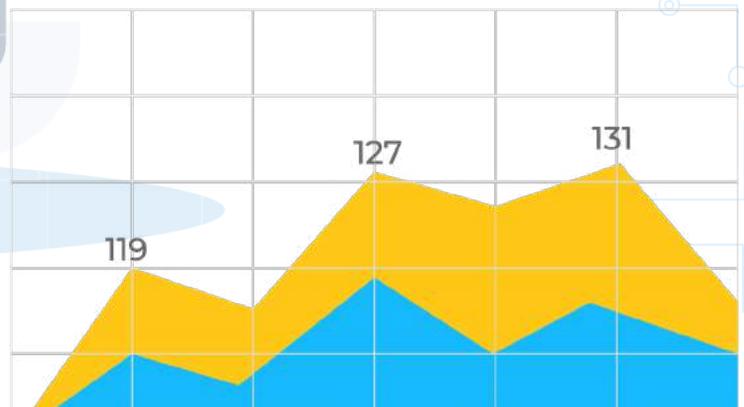
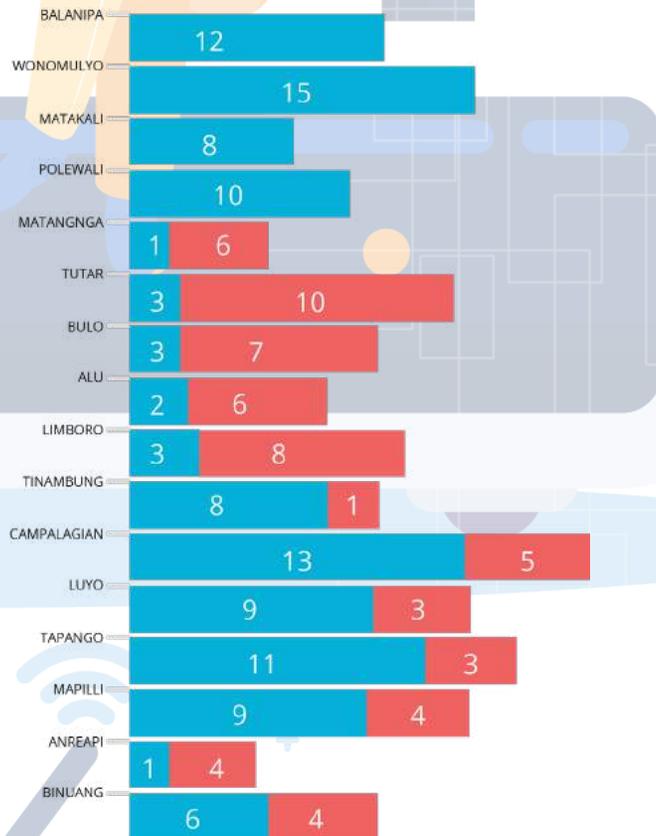


Chart 3.4
Pertumbuhan Menara Telekomunikasi Tahun 2019 s.d. 2021 dan Blankspot Desa per Kecamatan Tahun 2021

Analisis

Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya kebijakan SPBE yang mendorong Pemerintah Pusat melalui Kementerian Lembaga turut menyediakan aplikasi terintegrasi Pusat-Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang juga turut menunjang kinerja kementerian/ lembaga
- Berkembangnya teknologi Wifi Station Fiber Optic yang memiliki kecepatan jauh lebih baik dan aman sehingga memudahkan Perangkat Daerah dalam mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi manajemen
- Adanya monitoring, evaluasi dan penilaian penyelenggaraan SPBE yang memudahkan Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPBE
- Adanya komitmen BSSN untuk mensupport keamanan sistem informasi di daerah

Faktor Penghambat :

- Belum optimalnya implementasi kebijakan roadmap SPBE, arsitektur SPBE dan proses bisnis SPBE di daerah
- Belum terpadunya pengembangan aplikasi pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun Daerah
- Belum optimalnya kinerja Dewan Pengarah SPBE (TIK) Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan implementasi SPBE utamanya pemantapan fungsi-fungsi pemerintahan berbasis elektronik
- Terbatasnya sumber daya manusia yang memahami dan dapat mengimplementasikan perkembangan kebijakan dan tata kelola TIK di setiap Perangkat Daerah

Solusi :

- Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pemetaan kebutuhan aplikasi pemerintahan serta pendampingan dalam pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Kominfo, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri dan BSSN dalam pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai di tingkat pemerintah daerah dan penguatan keamanan sistem informasi
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan penyedia Bandwitch untuk peningkatan kualitas akses internet Perangkat Daerah
- Mengembangkan Pusat Data (Server Pusat) Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas teknologi informasi dan persandian daerah, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Aplikasi Informatika Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.061.142.400	Rp. 1.034.389.234	97,48
a. Pengembangan dan Pengelolaan SD TIK Pemerintah Daerah	Rp. 1.032.443.200	Rp. 1.032.443.200	97,41
b. Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Rp. 23.490.700	Rp. 23.490.700	100
c. Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi	Rp. 5208.500	Rp. 5.208.500	100

Sasaran Strategis 3 :

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran Strategis 3, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah	Persentase Fungsi-fungsi utama pemerintahan yang berbasis TIK	68%	74,56%	109,6%

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis III Tahun 2021

Indikator :

- Persentase Data Sektoral Yang Valid

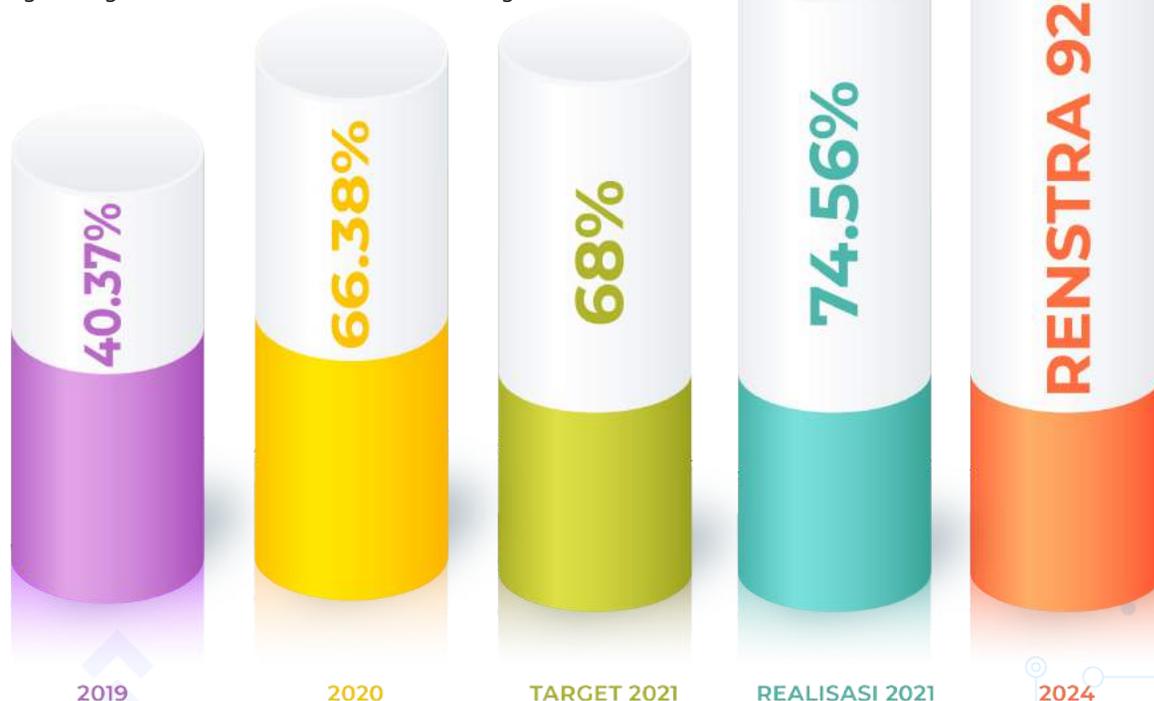
Target :

- 68 %

Tata kelola data menjadi penting seiring meningkatnya volume data dan informasi. Perkembangan teknologi dan informasi pun turut memberi pengaruh terhadap kecepatan, validitas dan penyediaan data yang up to date. Demikian pula kecepatan pengambilan keputusan dan penyusunan strategi pembangunan untuk mengatasi permasalahan dan isu strategis pemerintahan pembangunan, membutuhkan ketersediaan data yang cepat, akurat dan kekinian. Olehnya itu, Dinas KominfoSP merupakan Perangkat Daerah yang memastikan tercapainya sasaran meningkatnya kualitas data statistik daerah.

Adapun capaian kinerja sasaran 'Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah' Tahun 2021 dan perbandingan dengan tahun tahun sebelumnya dan target jangka menengah dapat dilihat pada Chart berikut ini :

Chart 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Kualitas Data Statistik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)





Sebagaimana capaian kinerja yang tersaji pada Chart di atas, maka diketahui bahwa Capaian Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah dengan indikator persentase data sektoral yang valid untuk Tahun 2021 mencapai 74,56% data valid. Valid dalam pengertian ini adalah data yang disampaikan melalui aplikasi Polman Satu Data telah memiliki kelengkapan perhitungan yang memadai dan disampaikan (diinput) oleh pejabat yang membidangi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara kelembagaan. Kondisi capaian 74,56% ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2021 yaitu 68% atau dengan capaian realisasi 109,6%. Apabila dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang saat itu validitas data sektoral masih di angka 40,37%, maka kondisi 2021 ini meningkat sebesar 34,19%. Adanya kebijakan pengelolaan data sektoral, optimalnya pendampingan kepada Perangkat Daerah selaku produsen data serta terlaksananya monitoring dan evaluasi pengelolaan data sektoral secara signifikan mempengaruhi capaian kinerja pengelolaan data sektoral.

Sedangkan untuk pencapaian target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP, realisasi kinerja 2021 ini sudah mencapai 81,04% dari target 92% yang ditentukan tahun 2024. Adapun kondisi pemenuhan data sektoral berdasarkan urusan pemerintahan daerah, dapat diamati pada Tabel berikut ini :

Tabel 3.6
Pemenuhan Data Sektoral Berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2021

NO	URUSAN	JUMLAH DATA	DATA TERINPUT	DATA LENGKAP PENUNJANG	%
1	Pendidikan	85	60	32	37,65
2	Kebudayaan	10	10	10	100,00
3	Kesehatan	74	45	41	55,41
4	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	38	29	24	63,16
5	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	10	6	6	60,00
6	Pertanahan	5	5	5	100,00
7	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25	23	22	88,00
8	Kebencanaan	10	7	7	70,00
9	Kesatuan Bangsa dan Politik	17	15	12	70,59
10	Sosial	44	39	38	86,36
11	Tenaga Kerja	12	12	10	57,14
12	Energi dan Sumber Daya Mineral	7	6	5	71,43
13	Transmigrasi	13	13	12	92,31
14	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	11	6	6	54,55
15	Pengendalian Penduduk dan KB	14	14	12	85,71
16	Pangan	15	15	15	100,00
17	Pertanian	83	83	80	96,39
18	Lingkungan Hidup	35	35	35	100,00
19	Kehutanan	3	3	3	100,00
20	Adminduk dan Pencatatan Sipil	35	30	21	60,00

21	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20	19	18	90,00
22	Perhubungan	22	11	8	27,59
23	Komunikasi dan Informatika	13	13	13	100,00
24	Statistik	4	4	4	100,00
25	Persandian	13	13	13	100,00
26	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	4	3	3	75,00
27	Perdagangan	10	10	10	100,00
28	Perindustrian	10	10	10	100,00
29	Penanaman Modal	27	27	27	100,00
30	Kepemudaan dan Olahraga	13	11	10	76,92
31	Pariwisata	15	12	10	66,67
32	Perpustakaan	21	21	21	100,00
33	Kearsipan	10	10	10	100,00
34	Kelautan dan Perikanan	39	30	28	71,80
35	Keuangan	54	47	44	81,48
36	Pendapatan	41	41	35	85,37
37	Kepegawaian	16	14	11	68,75
38	Pendidikan dan Pelatihan	4	4	4	100,00
39	Pengawasan	16	16	16	100,00
40	Sekretariat DPRD	19	12	11	57,90
41	Sekretariat Daerah	158	95	88	55,70
Jumlah		1.073	888	800	74,56

Melalui inovasi Polman Satu Data sebagai sebuah aplikasi berbasis web ini, Perangkat Daerah sebagai produsen data sektoral dapat melakukan pengelolaan data dengan lebih tertib, up to date dan valid. Publik juga dapat mengakses data sektoral ini dengan lebih mudah dan cepat dengan mengunjungi situs www.satudata.polmankab.go.id. Disisi lain, Pemerintah Daerah juga dapat melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pengelolaan data di setiap perangkat daerah sampai dengan ke tingkat satuan kerja terkecil di setiap perangkat daerah. Hasil monitoring dan evaluasi ini kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah pembinaan, baik

berupa pemberian penghargaan Data Award setiap Tahun pada perangkat daerah dengan kinerja Pengelolaan Data Terbaik, serta melakukan upaya-upaya pendampingan perbaikan kualitas data sektoral termasuk pemberian sanksi.

Untuk meningkatkan koordinasi, komunikasi dan kesepakatan antar penyelenggara statistik sektoral terhadap kebutuhan data yang akan datang telah dilakukan pertemuan Forum Satu Data tingkat Kabupaten Polewali Mandar yang dihadiri oleh Pembina Data, Koordinator Forum Satu Data, Wali Data dan Wali Data

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Adanya kebijakan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
- Tersedianya kebijakan Pemerintah Daerah berupa Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Data Sektoral di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
- Tersedianya teknologi sistem informasi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penataan pengelolaan data sektoral
- Meningkatnya perhatian publik terhadap ketersediaan data sektoral yang memadai

Faktor Penghambat :

- Belum meratanya komitmen Perangkat Daerah utamanya di tingkat pejabat eselon IV dalam menyediakan data yang cepat, lengkap dan dapat dipertanggung-jawabkan
- Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan statistik yang diperlukan pada prinsip satu data yang berkualitas yaitu : memenuhi standar data, dilengkapi dengan metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas, menggunakan kode referensi dan data induk
- Belum efektifnya penerapan sanksi bagi pemangku data yang tidak mampu menyediakan data sesuai standar data yang ditetapkan

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi dan pendampingan dengan Perangkat Daerah dalam pengelolaan data sectoral baik dalam penyediaan, pengolahan, penginputan termasuk pemanfaatan aplikasi Polman Satu Data
- b. Meningkatkan kapasitas dan kualitas aplikasi Polman Satu Data
- c. Menyelenggarakan pembinaan berupa monitoring, evaluasi, dan penilaian bagi Perangkat Daerah yang melakukan Pengelolaan Data Terbaik Tahun 2020

Adapun sejumlah Program dan Kegiatan yang diselenggarakan untuk memastikan tercapainya target indikator sasaran peningkatan kualitas teknologi informasi dan persandian daerah, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.100.800	Rp. 100.100.800	100
a. Koordinasi sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	Rp. 49.103.100	Rp. 49.103.100	100
b. Membangun metadata statistik sektoral	Rp. 50.997.700	Rp. 50.997.700	100



Sasaran Strategis 4 :

Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis IV Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder	Sangat Baik	Sangat Baik	109,6%

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran Strategis 4, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Indikator :

- Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder

Target :

- Sangat Baik (82)

Dalam upaya memastikan tercapainya sasaran strategis Dinas KominfoSP, maka diperlukan pula pencapaian sasaran strategis pada aspek manajemen perkantoran, sehingga kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan fungsi-fungsi pelayanan publik Dinas KominfoSP semakin membaik. Terdapat 9 (sembilan) layanan Dinas KominfoSP yang telah dilakukan survey kepuasan pelayanan, sebagai berikut :

1. Layanan peliputan
2. Layanan aspirasi dan pengaduan online rakyat (LAPOR)

3. Keterbukaan Informasi publik
4. Pemeliharaan jaringan TIK
5. Fasilitasi pendampingan pengelolaan aplikasi TIK
6. Fasilitasi pengelolaan website satuan kerja
7. Layanan pusat data (server) TIK
8. Layanan fasilitasi video conference
9. Layanan penyajian infografis data sektoral

Adapun capaian hasil survei pelayanan publik Dinas KominfoSP, pada tabel berikut :

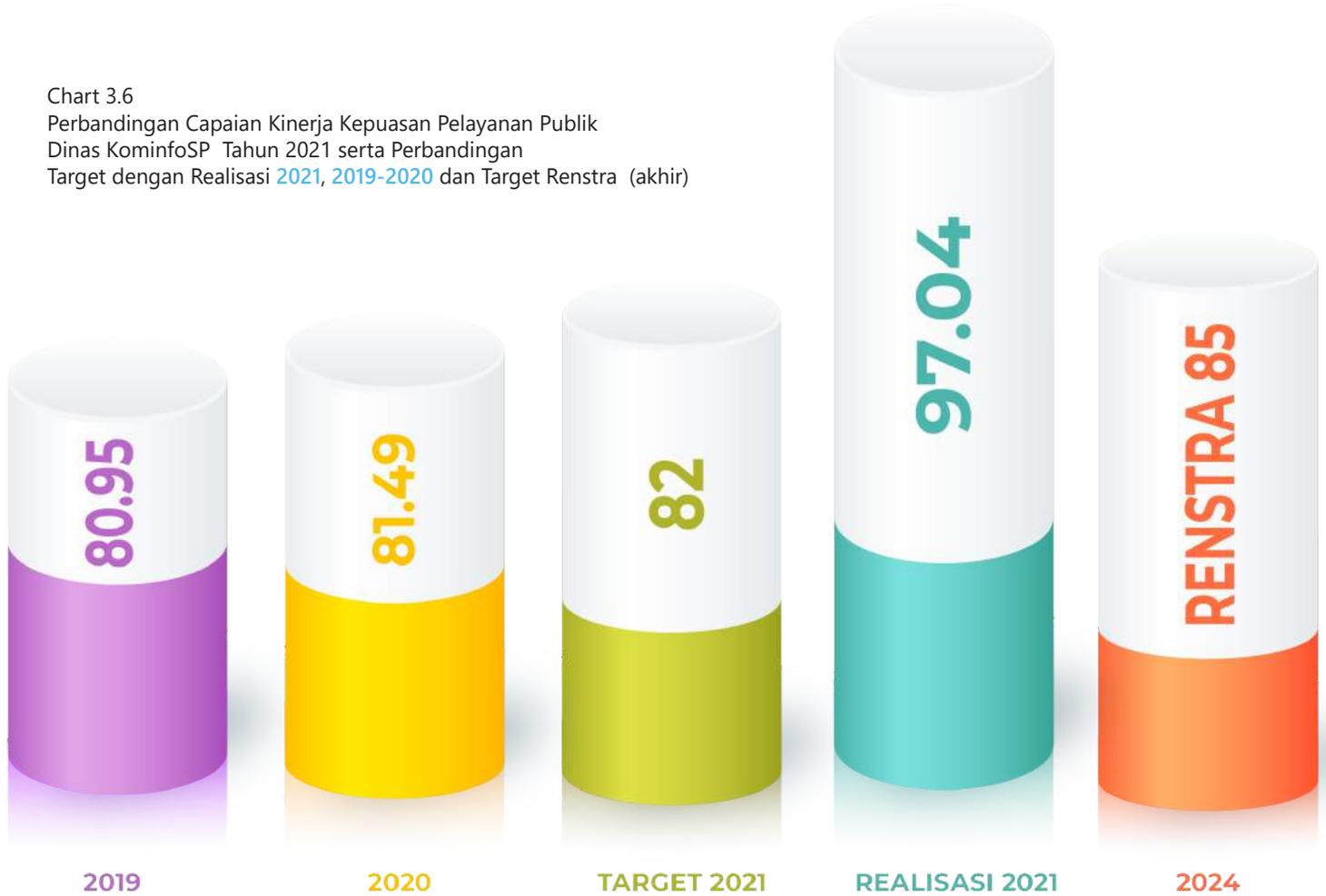
NILAI SURVEI

No	Layanan Yang Disurvei	Layanan Peliputan	LAPOR	Keterbukaan Informasi Publik	Pemeliharaan Jaringan TIK	Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Aplikasi TIK	Fasilitasi Pengelolaan Website Satuan Kerja	Layanan Pusat Data (Server) TIK	Layanan Fasilitasi Video Conference	Layanan Penyajian Infografis Data Sektoral	Jumlah
1	Persyaratan	96,13	98,44	95,21	96,94	96,17	94,5	100	100	94,94	96,93
2	Prosedur	94,93	96,78	97,92	98,90	96,62	96,53	100	100	95,17	97,43
3	Waktu Pelayanan	95,28	97,09	98,96	96,5	95,77	95,70	100	99,08	95,98	97,15
4	Biaya Tarif	97,29	96,16	98,96	100	97,4	95,58	100	99,70	98,03	98,12
5	Produk Layanan	95,67	97,19	97,92	93,75	96,59	97,53	100	97,83	95,68	96,91
6	Kompetensi Pelaksana	95,57	97,81	98,96	99,58	94,54	93,28	100	99,08	95,24	97,12
7	Perilaku Pelaksana	95,69	97,81	100,00	93,92	94,49	94,43	100	96,25	96,66	96,58
8	Penanganan Pengaduan, Sarana dan Masukan	93,74	98,44	100,00	96,81	95,01	96,73	100	99,08	90,77	96,73
9	Sarana dan Prasarana	92,92	97,19	98,96	96,77	95,98	94,65	100	97,83	93,53	96,43
	Indeks Kepuasan	95,25	97,43	98,54	97,02	95,84	95,43	100	98,76	95,11	
	Rata-rata IK					97,04					
						Predikat Kinerja Layanan					
				Tidak Baik		Kurang Baik		Baik		Sangat Baik	
				25 – 43,75		43,76 – 62,50		62,51 – 81,25		97,04 – 100	

Tabel 3.8
Hasil Survei Kepuasan Pelayanan Dinas KominfoSP Tahun 2021

Mencermati Tabel dan Chart terkait survei kepuasan layanan tersebut, maka dapat diketahui bahwa tingkat kepuasan masyarakat/stakeholders atas 9 jenis layanan Dinas KominfoSP tahun 2021 mencapai indeks 97,04 atau predikat kinerja layanan ‘Sangat Baik’. Ditinjau dari aspek nilai kepuasan, kondisi tahun 2021 ini meningkat 16,09% yang mana pada tahun 2021, nilai kepuasan berada di indeks 97,04. Kondisi ini melampaui capaian kinerja kepuasan pelayanan publik tahun 2019, predikat baik, indeks 80,95. Selanjutnya capaian kinerja kepuasan pelayanan publik pada tahun 2020 juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dengan predikat sangat baik, indeks 81,25. Tingginya motivasi kerja pegawai serta meningkatnya perhatian Perangkat Daerah terhadap layanan yang disediakan dinas KominfoSP, turut berpengaruh terhadap capaian kinerja kepuasan pelayanan publik. Tahun 2021, capaian kinerja kepuasan layanan publik meningkat sangat pesat. Adanya dukungan perkembangan teknologi informasi secara nyata sangat berpengaruh terhadap capaian ini. Selanjutnya, capaian tahun 2021 ini menunjukkan sudah tercapai 118,3 % dari target jangka menengah yang tertuang dalam Renstra Dinas KominfoSP tahun 2019-2024.

Chart 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja Kepuasan Pelayanan Publik Dinas KominfoSP Tahun 2021 serta Perbandingan Target dengan Realisasi 2021, 2019-2020 dan Target Renstra (akhir)



Sumber : Sekretariat Dinas KominfoSP, Januari 2022



Analisis

Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- Tingginya motivasi kerja Pegawai
- Adanya perkembangan teknologi dan informasi
- Meningkatnya perhatian perangkat daerah terhadap layanan yang disediakan Dinas KominfoSP

Faktor Penghambat :

- Kondisi Bangunan Gedung Kantor yang sebagian dalam kondisi kurang layak
- Terbatasnya kelengkapan sarana prasarana pelayanan

Solusi :

- Penataan ruang front office dan ruang kerja pegawai
- Optimalisasi pemeliharaan dan penyediaan sarana prasarana kerja

Sejumlah Program dan Kegiatan yang dialokasikan untuk memastikan terjaminnya pelayanan publik yang berkualitas, sebagai berikut :

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
Program Manajemen Perkantoran	304.843.526	300.607.491	98,61
Administrasi BMD Pada Perangkat Daerah			
Penatausahaan BMD Pada SKPD	629.000	629.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik	36.338.800	32.297.948	89
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	1.200.000	1.200.000	100
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.001.000	1.001.000	100
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	720.000	720.000	100
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	11.344.840	11.344.440	100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.100.000	16.100.000	100
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	100

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30.607.500	30.605.455	99,99
Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Pengadaan Mebel	1.500.000	1.500.000	100
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.900.000	7.900.000	100
Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik	35.637.840	31.443.876	88,23
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26.755.000	26.755.000	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.104.884	28.104.884	100
Pemeliharaan BMD Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	10.723.700	10.723.700	100
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.400.000	17.400.000	100
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7.900.000	7.900.000	100
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	979.000	979.000	100

Sasaran Strategis 5 :

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	A	A	

Tabel 3.9

Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis V Tahun 2021

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran Strategis 5, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Indikator :

- Predikat SAKIP Perangkat Daerah

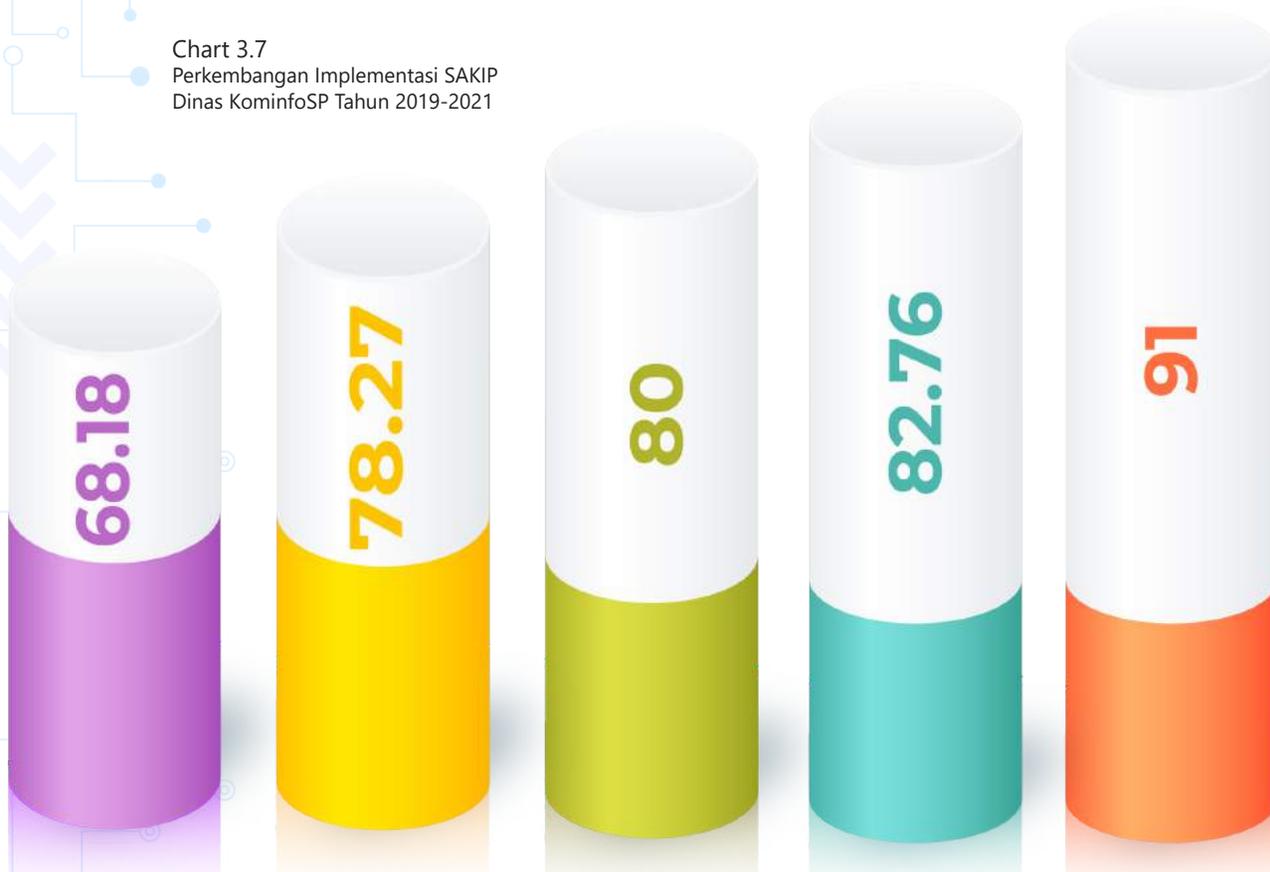
Target :

- A (80)

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Di tingkat Perangkat Daerah, juga diimplementasikan Perencanaan Kinerja berupa penyusunan Renstra, Renja, RKA, DPA, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi. Demikian pula halnya dengan pengukuran kinerja, dilakukan secara berjenjang berdasarkan sasaran, indikator sasaran, dan target yang diperjanjikan. Selanjutnya pada akhir tahun dilakukan penyusunan Laporan Kinerja berupa LAKIP dan diakhiri dengan reviuw oleh Inspektorat.

Komponen SAKIP	2018	2019	2020
Perencanaan Kinerja	28,85	29,7	28,80
Pengukuran Kinerja	19,07	23,13	22,19
Pelaporan Kinerja	6,88	10,31	11,86
Evaluasi Internal	3,38	4,13	5,41
Capaian Kinerja	10	11	14,50
NILAI	68,18	78,27	82,76
PREDIKAT	BB	BB	A

Chart 3.7
Perkembangan Implementasi SAKIP
Dinas KominfoSP Tahun 2019-2021



Mencermati perkembangan capaian implementasi SAKIP Dinas KominfoSP sebagaimana tersaji pada chart tersebut di atas, maka kualitas penerapan SAKIP Dinas KominfoSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, dari predikat BB pada tahun 2019 menjadi predikat A pada tahun 2021. Hal ini berarti bahwa kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja semakin membaik.

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- a. Tersedianya aplikasi e-SAKIP

Faktor Penghambat :

- a. Kurangnya SDM dalam pengelolaan data kinerja

Solusi :

- a. Peningkatan rapat-rapat internal untuk monitoring dan evaluasi kinerja
b. Penyusunan standar kelengkapan data-data kinerja organisasi

Sejumlah Program dan Kegiatan untuk menjamin pencapaian sasaran kualitas akuntabilitas kinerja perangkat daerah ini, sebagai berikut :

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.966.500	27.966.500	100
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.027.400	3.027.400	100
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	19.656.700	19.656.700	100
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.643.500	2.643.500	100
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.638.900	2.638.900	100

Sasaran Strategis 6 :

Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Predikat SAKIP Perangkat Daerah	WTP	WTP	

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Tahun 2021 pada sasaran Strategis 6, digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

Indikator :

- Opini Pengelolaan Keuangan

Target :

- WTP

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis VI Tahun 2021

Pada aspek sasaran strategis ini, diharapkan Dinas KominfoSP turut menjadi bagian pencapaian Opini Pengelolaan Keuangan BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Memperhatikan capaian Opini BPK dimaksud dalam 3 tahun terakhir yang selalu mencapai WTP, maka diharapkan pencapaian WTP untuk tahun anggaran 2021 ini dapat kembali mencapai WTP. Hasil opini BPK terhadap Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar masih dalam proses pemeriksaan BPK, namun dalam hal ini Dinas KominfoSP optimis turut menjadi Perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pencapaian Opini WTP.

Solusi :

- a. Mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi dengan Badan Keuangan dalam rangka penguatan akuntansi dan asset
- b. Peningkatan tertib administrasi keuangan dan tertib pengarsipan

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan

Faktor Penunjang :

- a. Tingginya komitmen seluruh jajaran pegawai Dinas KominfoSP untuk mencapai WTP atau tidak adanya temuan kerugian negara dan penyimpangan administrasi dan sistem prosedur
- b. Tersedianya aplikasi SIM Keuangan Daerah yang memudahkan tertib pengelolaan keuangan daerah

Faktor Penghambat :

- a. Belum optimalnya pemahaman akuntansi berbasis akrual SDM Pengelola Keuangan
- b. Belum optimalnya tertib administrasi aset

Adapun Program dan Kegiatan untuk pencapaian sasaran ini, sebagai berikut :

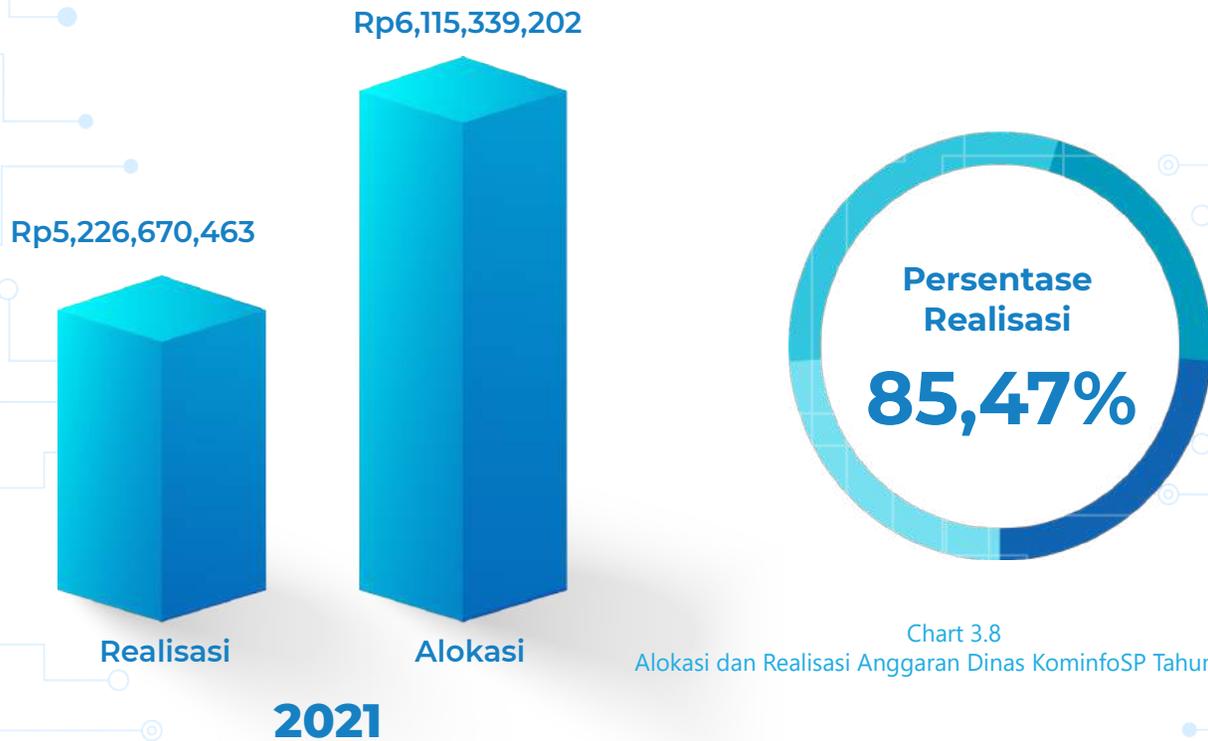
Program Peningkatan Tertib Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	22.116.000	22.115.500	100
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	3.488.000	3.487.900	100
Penyusunan Laporan Keuangan Berkala	15.146.000	15.146.000	100
Penataan Administrasi Aset/Barang PD	3.482.000	3.481.700	100

B. Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan dan ketaatan terhadap peraturan perundangan dalam penggunaan sumber daya finansial. Laporan akuntabilitas kinerja yang baik harus disertai pula laporan akuntabilitas keuangan, sehingga efisiensi dan efektifitas penganggaran dapat diukur serta dapat diketahui nilai manfaat dari hasil program dan kegiatan yang dilaksanakan.



Adapun Alokasi dan Realisasi Belanja Dinas KominfoSP, dapat disajikan sebagai berikut:



Untuk mengetahui akuntabilitas keuangan terhadap kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021, maka dapat diamati melalui Tabel berikut :

No	Sasaran Strategis dan Indikator	Target	Realisasi	%	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	%	% Efisiensi	Keterangan
1	Meningkatnya Kualitas Keterbukaan Informasi Publik	81	87,65	108,20%	Rp 1.723.568.224	Rp 1.439.375.024	83,51	24,6	Program Informasi dan Komunikasi Publik
	Predikat Keterbukaan Informasi Publik								
2	Meningkatnya Kualitas Teknologi Informasi dan Persandian Daerah	50	54,17	108,34%	Rp 1.061.142.400	Rp 1.034.389.234	97,48	10,86	Program Aplikasi Informatika
	Persentase Fungsi-fungsi Pemerintahan Yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi								
3	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Daerah	68	74,56	109,64%	Rp 100.100.800	Rp 100.100.800	100,00	9,64	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Persentase Data Sektoral Yang Valid								
4	Meningkatnya Kualitas Manajemen Perkantoran	82	97,04	118,3	Rp 229.722.524	Rp 227.026.515	98,82	19,48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Indeks Kepuasan Masyarakat/Stakeholder								
5	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja	80	82,76	103,45	Rp 27.966.500	Rp 27.966.500	100,00	3,45	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Predikat SAKIP Perangkat Daerah								
6	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	WTP	WTP	100	Rp 2.971.338.754	Rp 2.397.812.390	80,70	19,3	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
	Opini Pengelolaan Keuangan								
JUMLAH				107,98	Rp 6.115.339.202	Rp 5.226.670.463	85,47	14,55	

Tabel 3.11

Nilai Efisiensi pada Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Dinas KominfoSP Tahun 2021

Mencermati rata-rata realisasi kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2021 sebesar 107,98%, maka hal ini menunjukkan terjadinya efisiensi penggunaan dana sebesar 14,55%. Penggunaan Anggaran yang terealisasi 85,47% telah mampu menghasilkan rata-rata kinerja 107,98%.

BAB 4

Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar menyajikan capaian sasaran strategis Dinas Tahun 2021. Di dalam penyajian ini diuraikan realisasi kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah diperjanjikan, dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya serta perbandingan dengan target jangka menengah (tahun 2024) yang tertian di dalam dokumen Renstra 2019-2024. Selanjutnya diuraikan pula faktor penunjang keberhasilan, kendala yang masih dihadapi serta alternative solusi yang telah diupayakan. Laporan ini tentu dilengkapi pula dengan uraian akuntabilitas keuangan dan nilai efisiensi yang mampu dicapai atas kinerja yang dicapai.

Capaian kinerja Dinas KominfoSP Tahun 2021, secara keseluruhan dapat dinyatakan "berhasil". Hal ini ditunjukkan dengan Rata-rata pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas KominfoSP sebesar 108,17% serta capaian kinerja keuangan sebesar 85,47%. Kondisi ini memperlihatkan Dinas KominfoSP berhasil melakukan efisiensi penggunaan dana sebesar 14,73%.

Namun, tidak dipungkiri masih dijumpai sejumlah kendala yang perlu menjadi perhatian utama pada kinerja tahun-tahun selanjutnya yaitu, pada :

- Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, melalui aplikasi e-PPID dan pengelolaan Website Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) melalui koordinasi dan sinergi dengan perangkat daerah dalam merespon dan menindaklanjuti aduan dan aspirasi masyarakat;
- Peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pemanfaatan aplikasi umum berbagi pakai dan aplikasi khusus serta pengembangan Server Pusat Pemerintah Daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pelayanan publik;
- Peningkatan keamanan informasi melalui pemanfaatan tanda tangan digital serta kerjasama dengan BSSN untuk kelayakan keamanan informasi sistem elektronik pemerintah daerah;
- Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan pengelolaan data sektoral di seluruh Perangkat Daerah untuk menghasilkan data yang lebih berkualitas, baik dalam aspek validitas, kekinian, ketepatan, kelengkapan serta kemudahan pemanfaatan Polman Satu Data.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 ini disusun, untuk bahan evaluasi dan perbaikan kinerja selanjutnya.





TARRARE DIALLO TAMMATINDO (P. C. G.)
MAPPIKIRI AT UONNA PAOBANUA





DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA
STATISTIK PERSANDIAN